

**PENGARUH RASIO KOMISARIS INDEPENDEN, RASIO KOMITE
AUDIT, DAN UKURAN KAP TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN
KEUANGAN**

**(Studi Pada Perusahaan BUMN Publik yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2014-2018)**

DRAFT SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi
Program Studi S1 Akuntansi

YUDITTIRA YUHARA

NPM : C10160188



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS
BANDUNG
2020**

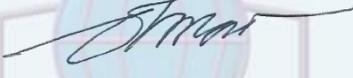
. PENGARUH RASIO KOMISARIS INDEPENDEN, RASIO KOMITE AUDIT, DAN
UKURAN KAP TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi Pada Perusahaan Badan usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)

YUDITTIRA YUHARA

NPM : C10160188

Bandung, 09 Maret
2020


Cecep Taufiqurrohman, SE, MM, Ak.

Mengetahui

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi


Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP.


Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.

Tanggung jawab yuridis ada pada penulis

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan nama jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 28 Februari 2020

(Yudittira Yuhara)
C10160188

**PENGARUH RASIO KOMISARIS INDEPENDEN, RASIO KOMITE
AUDIT, DAN UKURAN KAP TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN
KEUANGAN**

**(Studi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Publik Yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)**

**Ditulis Oleh:
Yudittira Yuhara**

**Pembimbing:
Cecep Taufiqurrohman, SE., MM., Ak**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap sedangkan variabel dependen dari variabel ini adalah integritas laporan keuangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN Publik yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian adalah 16 perusahaan BUMN Publik yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* selama periode penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan BUMN Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Kemudian analisis yang digunakan dalam hipotesis penelitian yang akan diuji menggunakan uji t dan uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan sebesar 3,580, rasio komite audit sebesar 2,352, dan ukuran kap sebesar 4,442. Selain itu, secara bersama-sama rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap berpengaruh secara bersama-sama terhadap integritas laporan keuangan sebesar 12,413.

**Kata Kunci: Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, Ukuran KAP,
dan Integritas Laporan Keuangan**

***EFFECT OF RATIO INDEPENDENT COMMISSIONERS, RATIO
COMMITTEE AUDIT, SIZE OF KAP ON INTEGRITY OF FINANCIAL
STATEMENTS***

***(Study on BUMN Companies listed on Indonesia Stock Exchange
in 2014-2018)***

***Written by:
Yudittira Yuhara***

***Preceptor:
Cecep Taufiqurrohman, SE., MM., Ak***

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of ratio independent commissioners, ratio committee audit, size of kap on the integrity of financial statements in BUMN companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2014-2018. The independent variable in this study is the ratio independent commissioners, ratio committee audit, and size of kap while the dependent variable of this variable is the integrity of financial statements.

The method used in this research is kuantitatif method with descriptive and verifikatif approach. The population in this study is the BUMN companies listed in IDX. The sample of research is 16 BUMN companies selected using purposive sampling method during the study period. The data source used is secondary data from the financial statements of BUMN companies listed on IDX in 2014-2018. Then the analysis used in the research hypothesis will be tested using the t test and the F test.

The results showed that the ratio independent commissioners had a positive effect on the integrity of financial statements by 3.580, ratio committee audit by 3.553, and size of kap by 4.442. In addition, together the ratio independent commissioners, ratio committee audit, and size of kap jointly influence the integrity of financial statements by 12.413.

Keywords : Ratio Independent commissioners, Ratio Committee Audit, Size Of KAP, and Integrity Of Financial Statements

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrobbil'alamin*, serta memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, Dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2018)”.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajiannya serta jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi peneliti berharap dapat mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan apa yang telah diperoleh, sehingga dilain waktu dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Dalam mempersiapkan dan menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah memperoleh banyak bantuan moril maupun materil dan bimbingan pengarahan serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat membantu kelancaran dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memberikan peneliti semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas semua Rahmat dan Hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Besarnya limpahan karunia yang telah diberikanNya membuat peneliti senantiasa selalu bersyukur.

2. Kedua orang tua, Ayah Agus Mutaqim dan Ibu Yeyet dan seluruh keluarga dirumah yang selalu memberikan doa'a tiada hentinya, motivasi baik moril maupun materil yang tidak ternilai harganya demi kelancaran selama proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP, selaku Ketua STIE EKUITAS.
4. Bapak Dr. Dani Dagustani, Ir., MM, selaku Wakil Ketua I STIE EKUITAS.
5. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM, selaku Wakil Ketua II STIE EKUITAS.
6. Bapak Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM, selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS.
7. Ibu Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi SI Akuntansi STIE EKUITAS.
8. Bapak Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd, selaku Sekretaris Program Studi SI Akuntansi STIE EKUITAS.
9. Bapak Cecep Taufiqurrohman, SE., MM., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas masukan dan evaluasi serta ilmu yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi peneliti.
10. Ibu Annisa Nurfitriana, SE., M.Si selaku dosen dan ibu terbaik di kampus selama peneliti menempuh perkuliahan di STIE EKUITAS.
11. Bapak Bimbim Maghriby, SE., Ak., M.Ak., BKP selaku dosen yang telah memberikan saran maupun solusi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Ade Imam Muslim, S.Pd., S.Akt., M.Si selaku dosen wali akuntansi 5 yang telah membimbing peneliti.

13. Seluruh Dosen Program Studi S1 Akuntansi STIE EKUITAS, Staf BAAK, BAU, dan Perpustakaan STIE EKUITAS.
14. Terima kasih kepada Yani Yulianti yang senantiasa memberikan dukungan yang tiada hentinya bagi peneliti. Sosok bibi yang memotivasi dalam segala hal. Terima kasih atas semuanya yang telah dilakukannya.
15. Terima kasih kepada Diki Haryadi dan Frian Octavia Rivera yang telah memberikan masukan mengenai penyusunan skripsi maupun aspek lainnya.
16. Terima kasih Kepada Bagas Prianto dan Afif Mungafif selaku sahabat dari kecil yang selalu memberikan semangat dan doanya dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada Alifa Zakia, Pradityo Eko sebagai sahabat, rekan yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
18. Terima kasih kepada keluarga Sibulga Aditya, Ari, Tutus, Lukman, Andri, Rizqi, Ahlal, Hanif selaku rekan sahabat seperjuangan yang sudah jatuh bangun bersama-sama saling bahu membahu dalam menjalani perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini. *See you on TOP My Friends.*
19. Terima kasih kepada Nur Rifda Fauziah, Mirza Agustina, Wina, terima kasih atas bantuan-bantuannya selama proses perkuliahan yang dijalani peneliti baik dalam mata kuliah maupun penyusunan skripsi ini.
20. Terima kasih kepada sahabat-sabatku *a.k.a* Rizqi, Hamdan, Alif, Adhi, Fatur terkhusus 2 anak PANG Nanda Septiani dan Dian Andriyani S. yang selalu sigap saat peneliti membutuhkan bantuan, selalu berantem, tetapi selalu ada dalam penyusunan skripsi ini.

21. Untuk Widia Astuti, Ramza, Ansiha, Khosi terima kasih atas segala masukan yang diberikan, terkhusus Mugia Rizky Lestari terima kasih bantuan-bantuannya selama proses perkuliahan baik dalam mata kuliah, organisasi, maupun penyusunan skripsi. Terima kasih sudah menjadi warna dalam perjalanan perkuliahan yang jatuh bangun.
22. Terima kasih kepada HIMASI, BPH HIMASI, dan Kompartemen Pendidikan yang telah mengajarkan begitu banyak hal selama peneliti menjalani masa perkuliahan.
23. Terima kasih kepada Yuda, septian, Alif yang selalu siap menyediakan *base camp* dan fasilitas untuk peneliti dalam menyusun skripsi ini.
24. Untuk teman-teman bimbingan bareng Tanti, Surya, Indah dan yang lainnya semoga kita selalu mengingat masa-masa ketika kita bimbingan.
25. Terima kasih untuk teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2016 khususnya Akuntansi 5 yang telah memberikan banyak hal kepada peneliti.
26. Pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, atas bantuan do'a restu yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan kepada peneliti. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Atas perhatiannya peneliti mengucapkan terima kasih.

Bandung, 28 Januari 2019

Peneliti

Yudittira Yuhara

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Peneliti	9
1.3.1 Maksud Peneliti.....	9
1.3.2 Tujuan Peneliti	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Kegunaan secara Akademis	11
1.4.2 Kegunaan secara Praktis.....	11
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	12
1.5.1 Lokasi Penelitian	12
1.5.2 Waktu Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN	
HIPOTESIS PENELITIAN.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Rasio Komisaris Independen.....	13
2.1.1.1 Pengukuran Rasio Komisaris Independen	14

2.1.2 Rasio Komite Audit.....	15
2.1.2.1 Pengukuran Rasio Komite Audit	18
2.1.3 Ukuran KAP	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Integritas Laporan Keuangan	21
2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan	21
2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan.....	22
2.1.4.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	23
2.1.4.4 Integritas Laporan Keuangan	24
2.1.4.5 Pengukuran Integritas Laporan Keuangan	25
2.1.5 Penelitian Terdahulu	30
2.2 Kerangka Pemikiran	37
2.2.1 Pengaruh Rasio Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan	37
2.2.2 Pengaruh Rasio Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan	38
2.2.3 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan	40
2.2.4 Paradigma Penelitian.....	43
2.3 Hipotesis Penelitian	44
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	45
3.1 Objek Penelitian	45
3.2 Metode Penelitian	45
3.2.1 Metode yang Digunakan	46
3.2.2 Operasional Variabel.....	47

3.2.3 Populasi dan Penentuan Teknik Sampel	50
3.2.3.1 Populasi	50
3.2.3.2 Sampel.....	51
3.2.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	53
3.2.4.1 Sumber Data.....	53
3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.2.5 Teknik Analisis Data.....	54
3.2.5.1 Uji Normalitas.....	55
3.2.5.2 Uji Multikolinearitas	56
3.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	57
3.2.5.4 Uji Autokolerasi	58
3.2.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
3.2.5.6 Analisis Koefisien Kolerasi.....	60
3.2.5.7 Analisis Koefisien Determinasi.....	62
3.2.6 Rancangan Uji Hipotesis	62
3.2.6.1 Uji F (Simultan)	64
3.2.6.2 Uji t (Parsial).....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1 Hasil Penelitian.....	68
4.1.1 Perkembangan Rasio Komisaris Independen pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.....	70

4.1.2	Perkembangan Rasio Komite Audit pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.....	75
4.1.3	Perkembangan Ukuran KAP pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.....	80
4.1.4	Perkembangan Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.	85
4.1.5	Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.	93
4.1.5.1	Uji Asumsi Klasik (Uji Kelayakan)	94
4.1.5.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	99
4.1.5.3	Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2).....	100
4.1.5.4	Pengujian Hipotesis (Uji F).....	102
4.1.5.5	Pengujian Hipotesis (Uji t).....	103
4.2	Pembahasan	107
4.2.1	Gambaran Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, Ukuran KAP, dan Integritas Laporan Keuangan	

pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.....	107
4.2.1.1 Perkembangan Rasio Komisaris Independen pada Perusahaan BUMN Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018	107
4.2.1.2 Perkembangan Rasio Komite Audit pada Perusahaan BUMN Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.....	108
4.2.1.3 Perkembangan Ukuran KAP pada Perusahaan BUMN Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.....	110
4.1.2.4 Perkembangan Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan BUMN Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018	111
4.2.2 Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan Secara Simultan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.....	113
4.2.3 Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan Secara Parsial pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.....	114

4.2.3.1 Pengaruh Rasio Komisaris Independen Terhadap	
Integritas Laporan Keuangan	114
4.2.3.2 Pengaruh Rasio Komite Audit Terhadap Integritas	
Laporan Keuangan	116
4.2.3.3 Pengaruh Rasio Kualitas Audit Terhadap Integritas	
Laporan Keuangan	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Gambaran Integritas Laporan Keuangan pada BUMN.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	49
Tabel 3.2	Hasil <i>Purposive Sampling</i> berdasarkan kriteria pada perusahaan BUMN Publik tahun 2014-2018.....	52
Tabel 3.3	Perusahaan BUMN yang menjadi sampel penelitian	52
Tabel 3.4	Kriteria Pengambilan Keputusan Uji <i>Durbin Watson</i>	59
Tabel 3.5	Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.....	61
Tabel 4.1	Daftar Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI yang Menjadi Sampel Penelitian	68
Tabel 4.2	Perkembangan Rasio Komisaris Independen pada Perusahaan BUMN Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.	71
Tabel 4.3	Perkembangan Rasio Komite Audit pada Perusahaan BUMN Publik yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018.....	76
Tabel 4.4	Perkembangan Ukuran KAP pada Perusahaan BUMN Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.....	81
Tabel 4.5	Perkembangan Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan BUMN Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.....	86
Tabel 4.6	Hasil Analisis Deskriptif.....	92
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorv Smirnov</i>	95
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolinearitas.....	96
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas	97
Tabel 4.10	Hasil Uji Autokolerasi	98

Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	99
Tabel 4.12	Hasil Koefisien Korelasi dan Deteriminasi	101
Tabel 4.13	Hasil Uji Statistik F.....	102
Tabel 4.14	Hasil Uji t variabel Rasio Komisaris Independen.....	104
Tabel 4.15	Hasil Uji t variabel Rasio Komite Audit.....	105
Tabel 4.16	Hasil Uji t variabel Ukuran KAP	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Paradigma Penelitian.....	43
Gambar 3.1	Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis.....	65
Gambar 3.2	Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis.....	66
Gambar 4.1	Grafik Perkembangan Rasio Komisaris Independen pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2014- 2018.....	72
Gambar 4.2	Rata-rata Perkembangan Rasio Komisaris Independen Per Tahun pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2014- 2018.....	74
Gambar 4.3	Grafik Perkembangan Rasio Komite Audit pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018	77
Gambar 4.4	Rata-rata Perkembangan Rasio Komite Audit Per Tahun pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2014- 2018.....	79
Gambar 4.5	Grafik Perkembangan Ukuran KAP pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.....	82
Gambar 4.6	Ukuran KAP Per Tahun pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.....	84
Gambar 4.7	Grafik Perkembangan Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.....	87

Gambar 4.8 Rata-rata Perkembangan Integritas Laporan Keuangan Per
Tahun pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun
2014-2018.....91

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Nama Perusahaan BUMN
- Lampiran 2 : Tabulasi Data Sampel variabel Rasio Komisaris Independen
- Lampiran 3 : Tabulasi Data Sampel variabel Rasio Komite Audit
- Lampiran 4 : Tabulasi Data Sampel variabel Ukuran KAP
- Lampiran 5 : Tabulasi Data Sampel variabel Integritas Laporan Keuangan
- Lampiran 6 : Hasil Output SPSS
- Lampiran 7 : Tabel *Durbin Watsons*
- Lampiran 8 : Tabel F Tabel
- Lampiran 9 : Tabel t Tabel
- Lampiran 10 : *Photocopy* Formulir Lembar Pengajuan Penulisan Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Permohonan Penggantian Topik/Judul
- Lampiran 12 : Surat Keputusan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : *Photocopy* Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 14 : Materi Saran/Revisi Hasil Ujian Sidang
- Lampiran 15 : Lembar Persetujuan Perbaikan (Revisi) Skripsi
- Lampiran 16 : Surat Keterangan Revisi
- Lampiran 17 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkat semakin maraknya dan tingginya persaingan dunia bisnis dalam sebuah perekonomian, banyak laporan keuangan perusahaan yang diragukan integritasnya. Laporan keuangan merupakan catatan resmi sebuah perusahaan yang akan digunakan sebagai media komunikasi antara pihak manajer dengan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak pemakai laporan keuangan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:1) Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat didalamnya. Pemilihan atas metode dan standar akuntansi yang akan digunakan sebagai basis pelaporan, dipengaruhi oleh persepsi pembuat laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhinya (Hery 2017:22).

Maka dari itu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan kepada setiap perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan. Perusahaan memilih metode akuntansi sesuai dengan kondisi dari perusahaan itu sendiri.

Untuk mengatasi kondisi perekonomian yang tidak stabil perusahaan harus berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Dengan demikian nilai keintegritasan dalam penyajian laporan keuangan tersebut harus sangat diperhatikan dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak perusahaan.

Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas *reliability* (Kieso, 2007:85) dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangannya sebagai alat pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi dari laporan keuangan tersebut dan dari pihak-pihak pemangku kepentingan *stakeholders*. Dengan demikian, laporan keuangan tersebut dituntut untuk disajikan dengan benar dan berintegritas yang tinggi agar laporan keuangan tersebut tidak bias dari pelanggaran.

Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai kenyataannya. *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan merupakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disajikan secara wajar, tidak bias dan secara jujur menyajikan informasi.

Laporan keuangan yang berintegritas memenuhi kualitas *reliability* yang terdiri dari 3 komponen, yaitu *verifiability*, *representational faithfulness* dan *neutrality*. Integritas informasi laporan keuangan dapat diproksi dengan konservatisme. Salah satu prinsip yang dianut dalam melaporkan laporan keuangan adalah prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme adalah cara untuk mempertimbangkan risiko ketidakpastian usaha di masa depan Dewi dan Putra (2016).

Table 1.1
Gambaran Integritas Laporan Keuangan pada BUMN

No	Kode Perusahaan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	GIAA	0,050	-0,050	-0,043	-0,034	0,056
2	WSKT	-0,085	-0,032	-0,181	-0,133	-0,045
3	TINS	-0,17	0,078	0,034	-0,096	-0,166
4	PGAS	-0,043	-0,028	0,010	0,001	0,002
5	BMRI	-0,008	-0,019	0,021	-0,021	-0,057
RATA-RATA		-0,0512	-0,0102	-0,0318	-0,0566	-0,042
MINIMUM		0,050	0,078	0,034	0,001	0,056
MAKSIMUM		-0,17	-0,050	-0,181	-0,133	-0,166

(Sumber: Hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan BUMN Publik tahun 2014-2018)

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan selama periode 2014 sampai dengan 2018 nilai rata-rata ke integritas dari laporan keuangan beberapa perusahaan BUMN tersebut menggunakan metode konservatisme mengalami peningkatan dan penurunan. Dari tabel tersebut diperoleh nilai rata-rata integritas laporan keuangan tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar -0,0102 dan nilai rata-rata terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar -0,0566. Nilai konservatisme paling tinggi yaitu sebesar 0,078 terjadi pada tahun 2015, sedangkan untuk nilai paling rendah yaitu sebesar -0,181 terjadi pada tahun 2016. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir pada tahun 2018 fenomena beberapa perusahaan BUMN ke integritas laporannya lemah tidak menyajikan laporan yang sesuai dengan keadaannya atau yang dapat berterima umum hal ini dibuktikan dengan metode konservatisme.

Ini sejalan dengan beberapa kasus skandal dalam memanipulasi laporan keuangan pada perusahaan BUMN kasus terbaru tersebut yaitu perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia

melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, perusahaan dengan kode saham GIAA berhasil meraup laba bersih sebesar US\$809 ribu, berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang merugi sebesar US\$216,58 juta.

Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal III 2018 perusahaan masih merugi sebesar US\$114,08 juta. *Trans Airways* berpendapat bahwa angka transaksi dengan Mahata sebesar US\$239,94 juta terlalu signifikan. Sehingga mempengaruhi neraca keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) tersebut. Jika dilihat dari nominal atas kerja sama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi US\$244,96 juta.

Selain manajemen perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil kantor akuntan publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan Garuda tersebut. Sehingga yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan kaidah perlakuan PSAK dan menyamping dari kode etik Akuntan Publik bahwa penyajian laporan keuangan tersebut harus integritas. Laporan keuangan tersebut harus disajikan dengan benar dan jujur (<https://finance.detik.com/>)

Perusahaan PT Pertamina dan PT PLN juga mempercantik laporan keuangan perusahaan pada posisi laba yang berhasil diperoleh Pertamina. Terjadi pada akhir tahun lalu, antara lain berkat perhitungan piutang pemerintah atas pembayaran selisih harga BBM yang mencapai US\$2,92 miliar atau sekitar Rp 41,6 triliun. Piutang tersebut berasal dari kompensasi selisih harga BBM pada 2017 dan 2018 yang belum dibayarkan pemerintah. *Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip* mengatakan pola pencatatan laporan keuangan

Garuda Indonesia, PLN, dan Pertamina sama, yakni pendapatan yang masih dalam bentuk piutang. Perbedaannya, pada kasus Garuda Indonesia, pihak yang berutang berasal dari perusahaan swasta, yakni Mahata.

Sedangkan dalam kasus PLN dan Pertamina, pemerintah menjadi pihak yang memiliki kewajiban membayar utang. Pemerintah sendiri berkewajiban membayar piutang itu kepada BUMN lewat berbagai skema. Salah satunya, dengan menganggarkan pembayaran piutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kasus laporan keuangan PLN lebih sulit dibandingkan kasus laporan keuangan Garuda Indonesia (<https://www.cnbcindonesia.com>).

Selain itu, pada tahun 2015 tercatat kasus keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT. Timah Persero Tbk, yang dimuat dalam (<https://economy.okezone.com>) yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut efisiensi dan strategi yang dilakukan membuahkan kinerja yang positif sehingga menghasilkan laba. Padahal kenyataannya laba operasi merugi sebesar Rp. 59 Miliar (Ali, anggota Ikatan Karyawan, 2016).

PT Waskita Karya (Tbk) merupakan salah satu BUMN jasa konstruksi diduga memanipulasi laporan keuangan pada tahun 2015. Praktik memanipulasi laporan keuangan ini terbongkar pada saat pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana. Direktur utama Waskita yang baru, M. Choliq yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, menemukan pencatatan yang tak sesuai, dimana ditemukan kelebihan pencatatan Rp 400 miliar. Direksi periode sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2014-2018 dengan memasukkan proyeksi pendapatan tertentu (<http://finance.detik>).

Kasus tersebut sebenarnya cukup membuktikan ditemukan terjadinya manipulasi data keuangan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai gagalnya keintegritas laporan keuangan dari laporan yang sudah disajikan oleh perusahaan. Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa integritas laporan keuangan harus sangat diperhatikan, karena integritas laporan keuangan adalah cerminan dari perusahaan dimata investor. Maka dari itu faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah Rasio komisaris independen, Rasio komite audit, dan Ukuran kap.

Komisaris independen berfokus pada tanggungjawab melindungi tindak kecurangan dari para pemegang saham tujuannya agar terhindar dari kecurangan yang dilakukan para *stakeholders* perusahaan (Dewi dan Putra 2016). Menurut Mais dan Nuari (2016) menyatakan bahwa semakin efektifnya komisaris independen menjalankan tugasnya, maka diharapkan akan mendorong peran komisaris dalam independensinya, sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen memiliki tingkat integritas yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya.

Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri, serta tidak terlibat dari tugas sehari hari pihak manajemen yang bertugas mengelola perusahaan dan mempunyai pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu kemandirian tersebut untuk meningkatkan integritas dan pandangan objektif dalam penyusunan laporan perusahaan, serta rekomendasi yang objektif sehingga pelaporan keuangan disajikan secara benar. Komite audit bertugas untuk mengawasi audit laporan keuangan apakah telah sesuai dengan standar akuntansi umum (Badewin, 2019).

Akuntan publik mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi atau laporan keuangan suatu entitas (Harventy, dkk 2015). Menurut Tuanakotta (2013:L-36) mengatakan bahwa tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atas laporan keuangan entitas, sedangkan penyajian laporan keuangan tersebut merupakan tanggungjawab manajemen.

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkapkan faktor-faktor yang berkaitan dengan integritas laporan keuangan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuseno dkk. (2018), menunjukkan bahwa rasio komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Purwaningtys dkk. (2018), Nurdianiah dan Pradika (2017), Dewi dan Putra (2016) menunjukkan bahwa rasio komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini karena rasio komisaris independen melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen berjalan efektif dan efisien dalam hal menyajikan laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Badewin (2019), Pradika dan Hoesada (2018), Sofia (2018), menunjukkan bahwa rasio komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah komite audit maka akan semakin integritas laporan keuangan, sehingga pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan oleh pihak manajemen akan lebih ketat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dan Pratomo (2014), Putra (2017) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa rasio komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Ardiansyah (2017) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa rasio komite audit berpengaruh secara negatif terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Widaryanti dan Sukanto (2018) menunjukkan Ukuran KAP berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan memaparkan bahwa perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit tinggi dan memiliki reputasi tinggi di lingkungan bisnis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wirama dkk (2016), Harventy (2015) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa ukuran kap tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian mengenai integritas laporan keuangan beberapa kali dilakukan untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi integritas laporan keuangan terjadi di Indonesia baik dari aspek perusahaan maupun dari aspek auditornya. Pada penelitian kali ini penulis tertarik untuk meninjau kembali apakah penelitian tersebut relevan bila digunakan pada laporan keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik tahun 2014-2018.

Dari beberapa uraian diatas, peneliti kemudian termotivasi untuk melakukan penelitian ini, karena masih banyak terjadi pada perusahaan BUMN yang memanipulasi laporan keuangan, agar perusahaan BUMN memiliki laporan keuangan yang terbukti kebenaran, kredibilitas, serta transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut memiliki cerminan baik dihadapan investor.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2018)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Rasio Komisaris Independen pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Bagaimana Rasio Komite Audit pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Bagaimana Ukuran KAP pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Bagaimana Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
5. Apakah Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap Integritas laporan keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
6. Apakah Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP berpengaruh secara parsial terhadap Integritas laporan keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Peneliti

1.3.1 Maksud Peneliti

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio

Komite Audit, dan Ukuran KAP terhadap Integritas laporan keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.3.2 Tujuan Peneliti

Tujuan Penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Rasio Komisaris Independen pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui Rasio Komite Audit pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui Ukuran KAP pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui Integritas laporan keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP secara simultan terhadap Integritas laporan keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
6. Untuk mengetahui Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP secara parsial terhadap Integritas laporan keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak manapun, adapun kegunaan yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan secara Akademis

- a. Bagi pihak akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan teori di Indonesia, khususnya mengenai masalah integritas dalam laporan keuangannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan Integritas laporan keuangannya.
- b. Bagi pihak peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dapat dijadikan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP terhadap Integritas laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan mengenai Integritas laporan keuangan (penyajian

laporan keuangan dengan benar dan jujur) sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.

- c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan untuk menjadi wacana serta referensi bagi penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Data penelitian ini di ambil dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari website resmi masing-masing perusahaan, dan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai. Periode penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun oleh perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Rasio Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Serta dewan komisaris independen melakukan pengawasan terhadap manajemen mengenai operasional perusahaan (Soemarso, 2018:287). Untuk menjalankan tugas secara efektif, pedoman perusahaan menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar harus memastikan komisaris independen memiliki hak yang sama, agar mendapatkan informasi yang sama juga sebagai komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan para pemegang saham dari perusahaan tersebut (Patel, 2014:218).

Komisaris independen, dalam hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UUPT, Komisaris independen telah diadopsi yakni pada pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) mengenai :

1. Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
2. Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat berdasarkan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Menurut peraturan OJK No.33/PJOK.04/2014 mengenai dewan komisaris yang menyebutkan bahwa :

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Komisaris independen dipandang inti sebagai tata kelola perusahaan, karena komisaris independen dari segi legislatif bukan kepentingan administrasi publik melainkan komisaris independen yang hanya bertanggung jawab kepada pihak perusahaan atau parlemen (Flaherty H., 2014:45).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan maka pihak peneliti menarik kesimpulan bahwa komisaris independen adalah suatu badan yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham lainnya, serta mempunyai peran penting dalam suatu tata kelola perusahaan tersebut. Dikarenakan komisaris independen merupakan inti dari tata kelola perusahaan.

2.1.1.1 Pengukuran Rasio Komisaris Independen

Menurut Pratomo dan Nurjannah (2014) proporsi rasio komisaris independen diukur dengan indikator anggota dewan komisaris yang berasal dari

luar perusahaan yang mencakup seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

Maka perhitungan proporsi komisaris independen adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris Perusahaan}} \times 100\%$$

2.1.2 Rasio Komite Audit

Berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal No.1X.1.5

Kep29/PM/2004 komite audit dinyatakan bahwa :

“Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik”.

Sedangkan pengertian komite audit yang dikemukakan oleh Soemarso (2018:289) bahwa komite audit sebagai organ pendukung dewan komisaris untuk menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang baik, dengan ini komite audit akan meningkatkan peran pengawasan dewan komisaris terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan, serta perancangan dan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Pendapat lainya oleh *Education* (2017:21) komite audit mempunyai peran penting untuk mencegah penyimpangan dari kebijakan tata kelola perusahaan, dan mempunyai peran penting lainya dalam memantau ke integritas pelaporan laporan keuangan perusahaan dalam hal meninjau kontrol keuangan internalnya, serta memantau kegiatan yang dilakukan oleh audit eksternal.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/PJOK.04/2015 memaparkan bahwa :

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Seorang komite audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dimana setiap perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 (tiga) orang yang diketuai 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode berikutnya”.

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap laporan keuangan yang akan disajikan ke publik, serta komite audit juga membantu pihak manajemen mengenai standar akuntansi yang berterima umum yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Pembentukan komite audit itu sendiri terdiri dari 1 (satu) orang dari dewan komisaris dan 2 orang independen dari luar perusahaan, karena komite audit didalam perusahaan minimal 3 orang untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.

Peraturan Bapepam No.IX.I.5 mengatur tentang persyaratan sebagai anggota komite audit, persyaratannya meliputi :

a. Kompetensi

1. Memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.
3. Memahami laporan keuangan dan bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

b. Integritas

Persyaratan tentang integritas adalah sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi
 2. Mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh komite atau perusahaan publik.
- c. Independensi
1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberikan jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai, dan jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen.
 2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
 3. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015 komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan proyeksi, dan laporan lainnya dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

2.1.2.1 Pengukuran Rasio Komite Audit

Menurut Ramadhani (2017) merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *corporate governance*. Rasio Komite audit diukur dengan besarnya jumlah persentase anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit dibagi dengan seluruh anggota komite audit.

$$\text{Rasio Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota komite dari luar perusahaan}}{\text{Jumlah total komite audit}} \times 100\%$$

2.1.3 Ukuran KAP

Ukuran Kap merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big Four*, serta memiliki cabang dan kliennya yaitu perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional diatas 25 orang (Wenny dan Monica 2015)

Menurut Press (2016:81) memaparkan bahwa ukuran kap adalah suatu firma yang harus secara spesifik dilisensikan untuk mengeluarkan sebuah opini audit. Firma-firma tersebut ada yang berafiliasi dengan KAP *the big four*, karena firma tersebut memiliki milyaran penerimaan uang dan bersifat global dalam operasinya, jika perusahaan berskala global, maka kemungkinan akan menggunakan salah satu dari firma tersebut sebagai auditor perusahaan tersebut.

Sedangkan pemaparan yang dilakukan oleh Fung dan Gul (2014:20) menyatakan bahwa kantor akuntan publik yang melakukan praktik akuntan publik bervariasi ukurannya. Firma yang tergolong dalam *the big four* maupun *non the big four*, tetapi ada beberapa kekhawatiran dikalangan akademis dan yang lainnya bahwa kantor akuntan publik dengan menyediakan layanan non audit untuk kliennya dapat mempengaruhi persepsi publik tentang independensi auditor.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa orang, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa ukuran kantor akuntan publik yaitu sebuah firma yang tugasnya memberikan jasa audit kepada perusahaan yang memerlukan jasa mereka, kantor akuntan publik tersebut ada yang tergolong kedalam akuntan publik *the big four* dan *non the big four*. Kantor akuntan publik sangat bervariasi tergantung pihak perusahaan yang akan menggunakan jasa mereka.

Menurut Wooten (2003) kualitas audit yang baik apabila jasa KAP melakukan hal-hal dibawah ini:

1. Deteksi salah saji

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap *skeptisisme profesional*. Sikap ini merupakan sikap yang mencerminkan sebuah pikiran yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis mengenai bukti audit yang diperoleh dilapangan.

Auditor dituntut untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang harus dimiliki sebagai profesi akuntan publik dalam melaksanakan *auditeenya*. baik secara cermat serta seksama yang dimaksud baik dan menggapai integritas dari pengumpulan maupun penilaian yang diperoleh dari bukti yang dikumpulkan oleh seorang auditor (IAI 2011SA Seksi 230).

2. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku

UU Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik pada pasal 1 butir 11 yang menyebutkan standar profesi akuntan publik, SPAP merupakan acuan yang ditetapkan menjadi sebuah pedoman dalam hal ukuran mutu yang wajib diatuhi oleh akuntan publik dalam memberikan jasanya.

3. Kepatuhan terhadap SOP

Standar operasional perusahaan adalah penetapan secara tertulis mengenai beberapa *point* penting didalamnya yang mengatur operasional perusahaan yang diperlukan menjadi kesatuan prosedur yang harus dilakukan serta ditaati.

2.1.4 Integritas Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:1) Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Laporan keuangan merupakan satu dari beragam informasi yang digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan, pengguna laporan keuangan tersebut dari luar perusahaan yaitu pihak investor dan kreditor (Yadiati dan Mubarak 2017:6).

Komponen laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi mengenai informasi keuangan yang biasanya digunakan oleh para pemangku kepentingan perusahaan untuk pengambilan keputusan, serta informasi yang terdapat di laporan keuangan tersebut berguna bagi para investor untuk melihat sejauh mana perusahaan tersebut berkembang.

2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan diklasifikasikan menjadi tiga, *APB Statement* No.4 dalam Yadiati dan Mobarok (2017:15) mengklasifikasikan tujuan menjadi tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan kualitatif, serta menempatkan mereka di bawah suatu kumpulan pembatasan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan.
2. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat :
 - i. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya;
 - ii. Menunjukkan pendanaan dan investasinya;
 - iii. Mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen-komitmennya;
 - iv. Menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya.
 - b. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba agar dapat :
 - i. Menyajikan ekspektasi pengembalian dividen kepada para investor;
 - ii. Menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kreditor dan pemasok, memberikan pekerjaan bagi karyawan-karyawannya, membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk perluasan usaha;
 - iii. Memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian kepada manajemen;

- iv. Menyajikan profitabilitas jangka panjang.
- c. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan.
- d. Untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban.
- e. Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan.

2.1.4.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015), karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. Dapat dipahami kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi *kompleks* yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.
2. Relevan informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Dapat diandalkan informasi harus memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan pengguna.
4. Dapat diperbandingkan pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi kinerja keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Berhubung pengguna ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

2.1.4.4 Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan yaitu menjelaskan bahwa pelaporan keuangan dan bagian akuntansi harus diperhatikan dengan benar untuk menilai ke integritasan laporan keuangan tersebut, serta perusahaan lebih memperhatikan praktik pelaporan dengan baik agar pihak audit internal melakukan pemrosesan tugasnya

berjalan dengan lancar tanpa menemukan adanya indikasi temuan dalam pelaporan keuangannya. (Rossi, 2014:206). Sedangkan oleh Hardy (2015:42) integritas laporan keuangan yaitu pihak manajemen telah melaksanakan akuntabilitas dan efektifitas dalam proses pelaporan keuangan yang berkaitan dengan menetapkan, mengoreksi, dan menilai, sehingga menciptakan laporan keuangan yang benar dan andal.

Pemaparan lainnya bahwa integritas laporan keuangan merupakan pelaporan laporan keuangan yang sesuai dengan kaidahnya. Presepsi integritas mengenai laporan keuangan perusahaan yaitu sesuai dengan waktu, transparansi, dan memberikan data yang tepat, apabila terjadi kurangnya ke integritasan dalam pelaporan laporan keuangan, maka mengakibatkan pihak perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan informasi laporan keuangan tersebut. Serta dapat berdampak kepada kebangkrutan yang akan dialami oleh suatu perusahaan tersebut Vařduva et al (2016:18).

Kesimpulan menurut peneliti bahwa integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan dengan benar dan handal, laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan informasi yang sebenarnya dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

2.1.4.5 Pengukuran Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi dapat dinilai dengan menggunakan prinsip konservatisme, seperti yang dijelaskan oleh Smith (2014) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi dapat dinilai dengan menggunakan prinsip konservatisme, karena dari prespektif perilaku

oportunistik teori akuntansi positif, perusahaan yang mengalami kegagalan manajemen akan menutupi masalah kinerja perusahaan dengan meningkatkan pendapatan serta aktiva bersih, maka untuk menghindari manipulasi, praktik akuntansi konservatisme sangat dibutuhkan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2017) ada beberapa metode yang menerapkan prinsip konservatisme. Beberapa metode terhadap penerapan prinsip konservatisme yaitu :

1. PSAK No.14 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Perhitungan biaya persediaan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) adalah perhitungan yang dapat menghasilkan laba lebih besar dari pada metode LIFO (*Last In First Out*) dan rata-rata tertimbang (*Average*). Hal ini disebabkan biaya persediaan yang besar menyebabkan harga pokok penjualan yang kecil, sehingga laba yang dihasilkan besar.
2. PSAK No. 16 mengenai asset tetap dan mengenai perhitungan biaya penyusutan.

Apabila menghitung penyusutan menggunakan metode yang semakin pendek jangka waktunya itu menandakan bahwa semakin konservatisme. Apabila menggunakan metode penyusutan saldo menurun (*double declining balance method*) merupakan metode yang lebih konservatisme dibandingkan dengan metode garis lurus (*Straight Line Method*), karena dengan hal inih metode saldo menurun mengeluarkan kos yang lebih besar sehingga akan menghasilkan laba yang lebih rendah.

3. PSAK No. 19 menentukan terhadap perlakuan asset tidak berwujud yang tidak diatur dalam standar khusus lainnya. Pernyataan ini mengukur untuk jumlah

tercatat dari asset yang tidak berwujud serta menentukan pengungkapan terhadap asset tidak berwujud tersebut. Metode amortisasi untuk asset tidak berwujud adalah :

- a. Metode garis lurus
- b. Metode saldo menurun
- c. Metode jumlah unit produksi

Dari ketiga metode tersebut bahwa saldo menurun lah lebih konservatisme karena periode waktu nya semakin kecil dibandingkan dengan metode yang lainnya karena menghasilkan kos yang lebih besar dibandingkan yang lainnya dan akan menghasilkan laba yang kecil pula.

4. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan.

Jika biaya riset dan pengembangan diakui sebagai beban daripada aktiva maka akan lebih konservatisme karena dapat menghasilkan laba yang lebih rendah, sedangkan jika biaya riset dan pengembangan diakui sebagai aktiva daripada sebagai beban itu tidak konservatisme karena perusahaan akan menghasilkan laba yang cenderung besar.

Seperti halnya di atas telah disebutkan bahwa ada beberapa metode dalam PSAK yang terkait dalam penerapan prinsip konservatisme. Konservatisme memiliki beberapa faktor yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut bermanfaat untuk mengetahui metode mana yang baik digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut penelitian sebelumnya Savitri (2016:61), dipaparkan bahwa terdapat tiga cara untuk mengukur tingkat ke integritas dari laporan keuangan yang disajikan, antara lain :

a. *Earnings/stock return relation measures*

Stock market price merefleksikan pada perubahan nilai asset pada saat terjadinya perubahan, baik terjadinya kerugian ataupun laba didalam nilai asset *stock return* tetap berusaha untuk melaporkan sesuai dengan waktunya. Prinsip kehati-hatian ini diukur dengan menggunakan pendekatan reaksi pasar atas informasi yang disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan. Prinsip kehati-hatian tersebut diukur dengan membentuk regresi antara *return* saham terhadap laba.

Konservatisme dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh (Basu,1997)

$$NI = \beta_0 + \beta_1 \text{NEG} + \beta_2 \text{RET} + \beta_3$$

Sumber : Basu dalam Savitri (2016)

Keterangan :

NI : Laba per lembar saham

RET : *Return* saham i pada tahun t

NEG : Variabel *dummy* dimana (1) apabila *return* negatif, (0) apabila *return* positif.

β_1 - β_2 : *slope* regresi

β_3 : informasi yang diungkapkan oleh perusahaan

b. *Earnings/accrual measures*

Pengukuran konservatisme dengan *earnings/accrual measure* yaitu mengukur kecenderungan dari nilai akrual untuk beberapa tahun. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan yang terjadi antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan dari kegiatan operasi. Pada penelitian ini tingkat ke integritas laporan keuangan diukur dengan rumus yang menghasilkan nilai yang akurat dari model Givoy dan Hayn (2000). Rumus dari metode yang dikemukakan oleh Givoy dan Hayn adalah:

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO})}{\text{TA}} \times (-1)$$

Sumber: Savitri, 2016

Keterangan :

CONNAC : *Earnings conservatism based on accrued items*

NIO : *Operating profit of current year*

DEP : *Depreciation of fixed assets of current year*

CFO : *Net amount of cash flow from operating activities of*

TA : *Book value of closing total assets*

Givoly dan Hayn dalam Savitri (2016) mengemukakan bahwa apabila nilai akrual bernilai pada posisi negatif (laba bersih lebih kecil daripada arus kas dari kegiatan operasi) yang konsisten dari tahun ke tahun, maka indikasi diterapkannya sebuah prinsip kehati-hatian. Semakin besar akrual negatif semakin besar nilai konservatisme dibandingkan dengan nilai akrual yang kecil dan mempunyai nilai koefisien positif. Hal ini ditandai dengan oleh teori prinsip konservatisme atau prinsip kehati-hatian menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat mengakui nilai biaya, sehingga memungkinkan pada laporan laba rugi yang konservatif akan menunda pengakuan pendapatan yang belum teralisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut akan dibebankan pada periode ini daripada dibebankan (biaya yang ditangguhkan) pada neraca.

c. *Net asset measures*

Ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat kehati-hatian atau konservatisme dalam penyajian laporan keuangan yaitu pada nilai asset yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Model pengukuran yang dikemukakan oleh Beaver dan Ryan (2000) menggunakan perhitungan *market to book ratio* yang mencerminkan bahwa nilai pasar relatif terhadap nilai buku pada perusahaan.

$$\text{Market to Book} = \frac{\text{Harga pasar per saham}}{\text{Nilai buku per saham}}$$
$$\text{Nilai Buku per saham} = \frac{\text{Total ekuitas}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Sumber: Savitri, 2016

Rasio ini merupakan perbandingan antara nilai pasar dengan buku ekuitas. Koefisien 1 menjelaskan bahwa keadaan tersebut menandakan konservatisme karena bernilai lebih dari 1, mencatat bahwa nilai perusahaan lebih rendah dari pada nilai pasarnya, sedangkan nilai 0 menandakan bahwa nilai perusahaan lebih tinggi dari pada nilai pasarnya maka dari itu nilai tersebut tidak konservatisme.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian sebelumnya memiliki hasil-hasil yang berbeda-beda dan penelitian-penelitian sebelumnya dijadikan referensi serta perbandingan bagi penelitian yang sedang dilakukan, berikut merupakan sajian mengenai beberapa penelitian yang sejenis sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Peneliti
1	N. P. Yani Wulandari I Ketut Budiarta (2014)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Dewan Direksi terhadap integritas laporan keuangan.	X1: Struktur Kepemilikan X2: Komite Audit X3: Komisaris Independen X4: Dewan Direksi Y: Integritas Laporan Keuangan	Dari hasil penelitian tersebut bahwa Kepemilikan Institusional, Dewan direksi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Komite audit, Komisaris independen, Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
2	Yeye Susilowati, Elen Puspitasari, Anton Yuseno (2017)	<i>The Influence Of Institutional Ownership, Independent Commissioner ,Audit Committee, Firm Size And Leverage To Integrity Of Financial Statement On Manufacturer s Listed In Indonesian Stock Exchange</i>	X1: Kepemilikan Institusional X2: Komisaris Independen X3: Komite Audit X4: Ukuran Perusahaan X5: <i>Leverage</i> Y : Integritas Laporan Keuangan	Dari hasil penelitian bahwa Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Komisaris independen, Komite audit berpengaruh negatif pada integritas laporan keuangan.
3.	Aina Zahra Parinduri, Risma Koeshartanti Pratiwi, Oktavina Ika Purwaningty (2018)	<i>Analysis of Corporate Governance, Leverage and Company Size on the Integrity of</i>	X1: <i>Corporate Governance</i> X2: <i>leverage</i> X3: Ukuran Perusahaan.	Dari hasil penelitian tersebut bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan

No	Nama Peneliti	Hasil Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Peneliti
		<i>Financial Statements</i>	Y : Integritas Laporan Keuangan	komite audit, kepemilikan manajemen, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh integritas laporan keuangan.
4	Ocktavia Nicolin, Arifin Sabeni (2013)	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> , Audit <i>Tenure</i> , Dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan	X1: Struktur <i>Corporate Governance</i> X2: Audit <i>tenure</i> X3: Spesialisasi Industri Auditor Y : Integritas Laporan keuangan	Dari hasil penelitian tersebut bahwa Komisaris Independen, Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. <i>Audit tenure</i> , Spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
5	Badewin (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei	X1: Kepemilikan Institusional X2: Komite Audit X3: Kualitas Audit Y : Integritas Laporan Keuangan	Dari hasil penelitian tersebut bahwa komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan institusional, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
6	Desi Efrianti (2012)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit	X1: Kepemilikan institusional X2: Komisaris independen X3: Komite Audit	Dari hasil penelitian tersebut bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit berpengaruh

No	Nama Peneliti	Hasil Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Peneliti
		Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan.	Y : Integritas Laporan Keuangan	terhadap integritas laporan keuangan.
7	Ida Ayu Sri Gayatri, I Dewa Gede Dharma Saputra (2013)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan <i>Leverage</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	X1: <i>Corporate governance</i> X2: Ukuran Perusahaan X3: <i>Leverage</i> Y : Integritas Laporan Keuangan	Dari hasil tersebut bahwa komisaris independen dan komite audit, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.
8	Qurrota A'yunin, Gusti Ketut Agung Ulupui, and Marsellisa Nindito (2019)	<i>The Effect of the Size of Public Accounting Firm, Leverage, and Corporate Governance on the Integrity of Financial Statement: A Study on Companies Listed on Indonesian Stock Exchange</i>	X1: Ukuran Perusahaan X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Good Corporate Governance</i> Y : Integritas Laporan Keuangan	Dari penelitian tersebut bahwa <i>leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap integritas laporan keuangan. Ukuran KAP, <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
9	Irma Paramita Sofia (2018)	Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan <i>Whistleblowing</i>	X1: Komite Audit Y: Integritas laporan keuangan Z: <i>Whistleblowing System</i>	Dari hasil penelitian tersebut bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh

No	Nama Peneliti	Hasil Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Peneliti
		<i>g System Sebagai Variabel Moderasi</i>		keterkaitan antara komite audit dan integritas laporan keuangan.
10.	Endra Pradika, Jan Hoesada (2018)	<i>Integrity Of Financial Statement : Big Is Not Guarantee</i>	X1: <i>Good Corporate Governance</i> X2: Ukuran perusahaan X3: <i>Leverage</i> Y: Integritas Laporan Keuangan	Dari hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional, komite audit, <i>leverage</i> berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
11	Dade Nurdiniah, Endra Pradika (2017)	<i>Effect of Good Corporate Governance, KAP Reputation, Its Size and Leverage on Integrity of Financial Statements</i>	X1: <i>Good Corporate Governance</i> X2: Reputasi KAP X3: <i>Leverage</i> Y: Integritas laporan keuangan	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa komisaris independen, reputasi KAP berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

No	Nama Peneliti	Hasil Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Peneliti
12	Syiar Renaldi, Yana Fajriah, Muh Asbar, Ilham Jayam, Riri R. (2017)	Pengaruh Independensi, Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Kualitas Audit	X1: Independensi X2: Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> X3: Kualitas Audit Y: Integritas Laporan Keuangan	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa kepemilikan instutisional dan kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Independensi, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
13	Eman Sukanto, Widaryanti (2018)	Analisis Pengaruh Ukuran Kap Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2015)	X1: Ukuran Kap X2: Tata Kelola Perusahaan Y: Integritas Laporan Keuangan	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa Ukuran KAP, Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

No	Nama Peneliti	Hasil Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Peneliti
14	Amrulloh, IG.A. Made Asri Dwija Putri, Dewa Gede Wirama (2016)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Kap, Audit <i>tenure</i> Dan Audit <i>Report Lag</i> Pada Integritas Laporan Keuangan	X1: Mekanisme GCG X2: Ukuran Kap X3: Audit <i>Tenure</i> X4: Audit <i>Report Lag</i> Y: Integritas Laporan Keuangan	Berdasarkan Penelitian tersebut bahwa Kepemilikan Institusioanal, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Audit <i>Tenure</i> , Audit <i>Report Lag</i> berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan Ukuran Kap tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
15	Inosensius Istiantoro, Ardi Paminto, Herry Ramadhani (2017)	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI	X1: Struktur <i>Good Governance</i> Y : Intgeritas laporan keuangan	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan

Sumber : Data diolah, 2019

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Rasio Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Dewi dan Putra (2016) manfaat adanya komisaris independen dalam teori keagenan dapat meningkatkan transparansi terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meminimalisir tindakan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi manajemen. Dengan adanya komisaris independen sebagai pihak independen yang mengawasi kinerja manajemen, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berintegritas. Maka dengan itu terdapat pengaruh rasio komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan, pemaparan yang dilakukan oleh Wu dan Patel (2014:30) Rasio Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan menyebutkan pada dasarnya dewan direksi/komisaris independen harus membuat penilaian obyektif, dalam melaksanakan tugasnya, serta memantau pihak manajerial untuk memastikan nilai ke integritasan penyajian laporan keuangannya.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Purwaningty's dkk. (2018) menunjukkan bahwa semakin banyaknya proporsi rasio komisaris independen akan meningkatkan ke integritasan laporan keuangan yang disajikan. Dalam hal ini komisaris independen memiliki independensi dan integritas yang kuat sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh prestasi manajemen, maka pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Nurdiniah dan Pradika (2017), Dewi dan Putra (2016), Mais dan Nuari (2016), Gayatri dan Suputra (2013)

yang menyatakan rasio komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan pemahaman peneliti dari teori yang sudah ada maka disimpulkan bahwa rasio komisaris independen memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan dikarenakan semakin banyaknya proporsi komisaris independen didalam suatu perusahaan, maka tingkat pengawasan terhadap operasional perusahaan berjalan dengan baik. Sehingga pihak manajemen tidak bisa melakukan tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan, maka laporan keuangan yang dibuat memiliki integritas yang tinggi dan sesuai dengan kenyataannya.

2.2.2 Pengaruh Rasio Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Dewi dan Putra (2016) berdasarkan surat keputusan BAPEPAM setiap perusahaan yang telah *go public* wajib memiliki komite audit. Komite audit bertugas untuk melaksanakan pengawasan independen terhadap laporan keuangan dan audit eksternal, komite ini dibentuk oleh dewan direksi. Maka dengan itu terdapat pengaruh rasio komite audit terhadap integritas laporan keuangan.

Pemaparan lain yang dikemukakan oleh Krzus dan Sydneyribot (2015:145) Rasio Komite Audit memiliki pengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan menyebutkan bahwa komite audit secara langsung bertanggung jawab terhadap pengawasan antara manajemen dan auditor internal mengenai pelaporan laporan keuangan. Agar tujuan yang sudah dirancang oleh perusahaan tersebut dapat tercapai baik dalam hal menerbitkan laporan keuangan ke publik maupun mempunyai nilai integritas yang tinggi dari laporan keuangan yang diterbitkan.

Sedangkan Vallabhaneni (2015:16) memaparkan bahwa rasio komite audit bertanggung jawab untuk memastikan keandalan dan keintegritasan laporan keuangan yang mencakup segala aspek laporan keuangan, serta komite audit juga memastikan bahwa tata kelola dalam perusahaan tersebut berjalan dengan baik, dengan demikian komite audit bisa dikatakan sebagai kontrol dari perusahaan tersebut.

Rampersad dan Hussain (2014:187) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh antara rasio komite audit dengan integritas laporan keuangan karena komite audit dan dewan direksi sangat berperan penting dalam pemenuhan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan ke integritasan dari laporan keuangan yang akan diterbitkan. Soemarso (2018:293) memaparkan juga bahwa terdapat pengaruh antara rasio komite audit terhadap integritas laporan keuangan dimana komite audit melakukan penelaahan laporan keuangan dengan mendiskusikan laporan tersebut kepada direktur keuangan dan bagian akuntansi atau bagian lain yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan, sehingga pihak perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang berintegritas tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradika dan Hoesada (2018) membuktikan bahwa komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris/direksi untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab pengawasan secara independen terhadap pelaporan laporan keuangan dengan penuh keyakinan dari komite audit tersebut. Semakin kuat independensi dari komite audit dalam pengawasan laporan keuangan maka semakin integritas laporan keuangan tersebut. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Paramita (2018), Pradika dan Hoesada (2018), Badewin (2019) yang

mengatakan rasio komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan pemahaman peneliti dari teori yang sudah ada maka dapat disimpulkan rasio komite audit memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan, dikarenakan semakin independensi komite audit dalam melakukan pengawasan laporan keuangan, serta semakin efektifnya menjalankan tugas dan kewajiban tersebut dalam hal memahami standar akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan, maka pelaporan laporan keuangan yang disajikan akan mempunyai nilai integritas yang tinggi dan dapat diandalkan. Komite audit juga melakukan pengawasan terhadap audit internal dan eksternal mengenai laporan keuangan sehingga apabila terjadi perselisihan antara audit internal dan eksternal komite audit sebagai penengah untuk terciptanya laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi dan dapat diandalkan.

2.2.3 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan

KAP besar memiliki jumlah tenaga profesional dan staf yang lebih banyak daripada KAP kecil (Messier dkk, 2014:40). Oleh karena itu, dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan entitas yang memiliki ruang lingkup yang luas, KAP besar dapat melakukan audit menyeluruh sehingga laporan keuangan yang diaudit dapat memberikan hasil yang lebih baik dan meningkatkan integritas laporan keuangan entitas tersebut.

Ukuran KAP, banyak yang memproksikan ukuran KAP dengan kualitas audit karena kedua proksi tersebut dianggap dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. KAP besar dianggap lebih memiliki insentif yang lebih untuk

menghindari hal-hal yang merusak reputasinya sehingga auditor berusaha untuk bersikap transparan, independen dan kompeten (Wirama dkk (2016)).

Sedangkan Willekens dkk (2014:28) memaparkan bahwa para pengguna laporan keuangan menimbulkan pertanyaan apakah laporan keuangan memiliki kualitas audit yang tinggi dan konsisten secara global, sehingga perusahaan yang memiliki jaringan perusahaan global yang luas, akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi kerana menggunakan KAP yang memiliki kompeten yang tinggi. Sehingga berdampak pada laporan keuangan yang diauditnya mempunyai nilai ke integritasan yang tinggi.

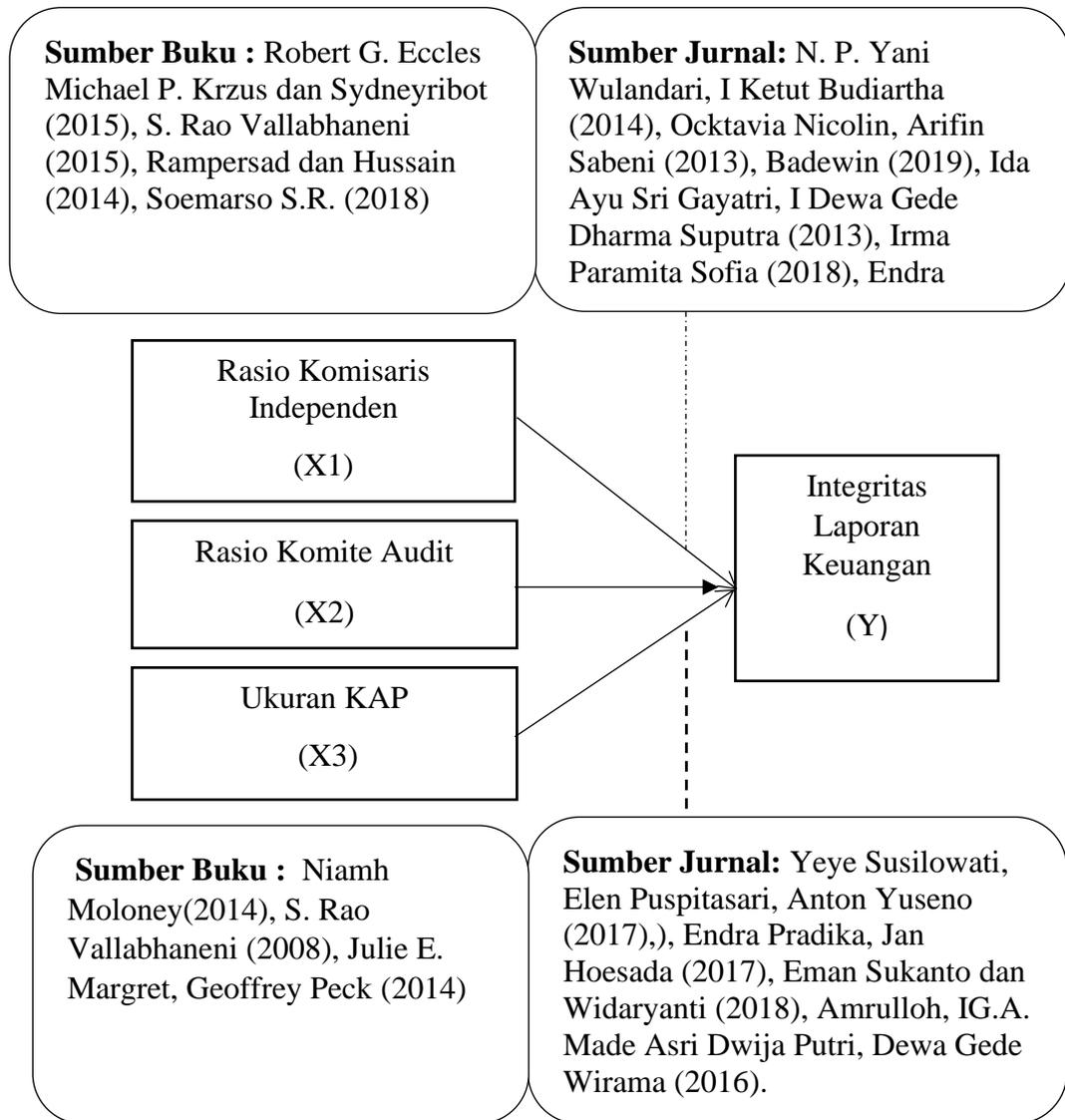
Rittenberg dkk (2015:298) apabila terjadi resiko keuangan pada suatu perusahaan, akibat salah pencatatan transaksi dan penyajian data laporan keuangan pada suatu organisasi, maka resiko inheren dalam pencatatan transaksi dan penyajian data laporan keuangan tinggi. Oleh sebab itu auditor khawatir bahwa pihak manajemen melakukan pencatatan transaksi dan penyajian data laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaannya. Hal ini yang akan mempengaruhi kualitas auditnya dan ke integritasan laporan keuangan karena tingkat integritas laporan keuangan melekat pada resiko tingkat keuangan yang diatur oleh kompetensi dari seorang manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Badewin (2019) kualitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor dengan perbedaan KAP *Big Four dan Non Big Four* serta juga menggunakan spesialisasi industri auditor bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kualitas audit. Hal ini didukung dengan penelitian Saksakotama dan Cahyonowati (2014), Widaryanti dan Sukanto (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh ukuran kap terhadap integritas laporan keuangan

Berdasarkan pemahaman peneliti dari teori yang sudah dipaparkan bahwa terdapat pengaruh antara ukuran kantor akuntan publik terhadap integritas laporan keuangan hal ini dibuktikan dengan firma-firma yang terbagi ke dalam Kap *the big four* dan *non the big four* bahwa semakin baik kantor akuntan publik melakukan pemrosesan auditnya maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga auditor tersebut dapat menemukan kesalahan sajian praktik akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan kliennya. Kantor akuntan publik tersebut harus bersikap transparan, independen, kompeten dalam melaksanakan jasa *auditeenya*, sehingga pihak kliennya akan merasakan kepuasan terhadap akuntan publik yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut.

2.2.4 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

Sumber : Data diolah, 2019

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono,2017:63).

Dari penerapan kerangka pemikiran dan didukung dengan teori yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan.

H₂ : Rasio Komisaris Independen berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan.

H₃ : Rasio Komite Audit berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan.

H₄ : Ukuran KAP berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, yang pertama kali diperhatikan yaitu objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek atau variabel penelitian tersebut terkandung sebuah masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Sugiyono (2017:38), memaparkan bahwa objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Adapun menurut Juliandi dkk (2014:32), objek penelitian adalah apa atau siapa yang dijadikan sumber penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah rasio komisaris independen (XI), rasio komite audit (X2), ukuran kap (X3), dan integritas laporan keuangan variabel (Y). Subjek penelitian ini dilakukan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Datanya berupa laporan keuangan perusahaan selama tahun 2014-2018.

3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara

umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada (Sugiyono ,2017:2)

3.2.1 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:15) memaparkan metode kuantitatif adalah :

“Metode kuantitatif dinamakan metode tradisonal, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmu yang konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga bisa disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Menurut Sugiyono (2017:19) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan dari nilai satu atau variabel secara mandiri. Dalam penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel ini dengan variabel lain. Melalui jenis penelitian deskriptif maka dapat diperoleh deskripsi mengenai rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap terhadap integritas laporan keuangan.

Moh. Nazir (2011:91) mendefinisikan pengertian metode verifikatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas

(hubungan sebab akibat) antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis menggunakan suatu perhitungan statistik sehingga di dapatkan hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis, dalam hal bertujuan untuk mengetahui rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap terhadap integritas laporan keuangan.

3.2.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2018:57) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Variabel independen/variabel bebas (X)

Menurut Sugiyono (2018:57), Variabel independen/variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam SEM (*Structural Equation Modeling*) pemodelan persamaan struktural, variabel independen disebut sebagai variabel eksogen.

a. Rasio Komisaris Independen (X1)

Menurut S.R. Soemarso (2018:287) komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya, serta dewan komisaris independen

melakukan pengawasan terhadap manajemen mengenai operasional perusahaan.

b. Rasio Komite Audit (X2)

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/PJOK.04/2015 memaparkan bahwa Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Seorang komite audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dimana setiap perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 (tiga) orang yang diketuai 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode berikutnya.

c. Ukuran KAP (X3)

Menurut Press (2016:81) memaparkan bahwa ukuran kap adalah suatu firma yang harus secara spesifik dilisensikan untuk mengeluarkan sebuah opini audit. Firma-firma tersebut ada yang berafiliasi dengan KAP *the big four*, karena firma tersebut memiliki milyaran penerimaan uang dan bersifat global dalam operasinya, jika perusahaan berskala global, maka kemungkinan akan menggunakan salah satu dari firma tersebut sebagai auditor perusahaan tersebut.

2. Variabel Dependen/variabel terikat (Y)

Menurut Sugiyono (2018:57), Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Di dalam SEM (*Structural Equation Modeling*) pemodelan persamaan struktural, variabel dependen disebut sebagai variabel endogen.

a. Integritas Laporan Keuangan (Y)

Menurut Hardy (2015:42) integritas laporan keuangan yaitu pihak manajemen telah melaksanakan akuntabilitas dan efektifitas dalam proses pelaporan keuangan yang berkaitan dengan menetapkan, mengoreksi dan menilai sehingga menciptakan laporan keuangan yang benar dan andal.

Operasional variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian. Operasionalisasi variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Komisaris Independen (X1)	Rasio Komisaris Independen $\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris Perusahaan}} \times 100\%$ (Sumber : Pratomo dan Nurjannah (2014).	Rasio

Variabel	Indikator	Skala
Komite Audit (X2)	Rasio Komite Audit $\frac{\text{Jumlah anggota komite dari luar perusahaan}}{\text{Jumlah total komite audit}} \times 100\%$ (Sumber : Ramdhani (2017)).	Rasio
Ukuran KAP (X3)	Apabila perusahaan menggunakan jasa audit KAP <i>the big four</i> maka diberi nilai 1. Apabila perusahaan menggunakan jasa audit KAP <i>non the big four</i> maka diberi nilai 0. (Sumber : Widaryanti (2018)).	Nominal
Integritas Laporan Keuangan (Y)	Integritas Laporan Keuangan $\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO})}{\text{TA}} \times (-1)$ (Sumber : Givoly dan Hayn dalam Ahmed, 2002).	Rasio

Sumber : Data diolah, 2019

3.2.3 Populasi dan Penentuan Teknik Sampel

3.2.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018:130) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

3.2.3.2 Sampel

Menurut Sekaran & Bougie (2017:54), sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri dari atas sejumlah anggota yang terpilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa, namun tidak semua, elemen populasi membentuk sampel. Pengambilan sampel (*sampling*) adalah proses memilih sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran & Bougie, 2017:58).

Penentuan pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *sampling* yaitu teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Menurut Sugiyono (2018:138) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis. Sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Perusahaan BUMN Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

2. Perusahaan yang terdaftar di BEI tidak melakukan transaksi akuisisi dan merger selama 1 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2018.
3. Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel yang diteliti oleh peneliti.

Tabel 3.2

Hasil *Purposive Sampling* Berdasarkan Kriteria Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik Tahun 2014-2018.

KRITERIA		JUMLAH
1	Jumlah Perusahaan BUMN Publik yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.	20
2	Perusahaan yang terdaftar di BEI tidak melakukan transaksi akuisisi dan merger selama 1 januari 2014 sampai dengan 31 desember 2018.	(3)
3	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel yang diteliti oleh peneliti.	(1)
Jumlah Sampel		16
Tahun Pengamatan		5
Jumlah Pengamatan		80

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 3.3

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADHI	Adhi Karya Tbk
2	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
3	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk
4	BBTN	Bank Tabungan Negara Tbk
5	BMRI	Bank Mandiri Tbk
6	JSMR	Jasa Marga Tbk
7	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk
8	GIAA	Garuda Indonesia Tbk
9	SMGR	Semen Indonesia Tbk
10	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk
11	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk
12	KAEF	Kimia Farma Tbk
13	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk
14	KRAS	Krakatau Steel Tbk
15	SMBR	Semen Baturjaja Tbk

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
16	PPRO	PT Properti Tbk

Sumber : Data diolah, 2019

3.2.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1 Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan dari sebuah fakta. Dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yang dipakai, yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:130) memaparkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan laporan keuangan yang berasal dari www.idx.co.id dan *website* masing-masing perusahaan untuk tahun 2014-2018, dan sumber-sumber lain yang peneliti peroleh dari beberapa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2018:270). Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian. Kegunaan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang diteliti sebagai pedoman untuk melakukan studi dalam peneliti di lapangan.

b. Laporan Data Publikasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder yang diperoleh melalui situs internet www.idx.co.id, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan selama lima tahun, yaitu dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel jurnal penelitian terdahulu dan buku yang terkait dengan penelitian.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:226) memaparkan bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang akan diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak akan dilakukan.

Menurut Gunawan (2016:92) sebelum melakukan analisis data dengan teknik tertentu, harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, guna menjawab hipotesis penelitian. Pengukuran yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan uji autokolerasi.

3.2.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Jika dari distribusi sampel adalah normal, maka dapat dikatakan sampel yang akan diambil mewakili populasi. Prinsip dari uji normal adalah membandingkan antara distribusi data yang didapatkan (*observed*) dan distirbusi data normal (*expected*). Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data yang baik adalah data yang memiliki koefisien berdistribusi normal.

Terdapat dua cara untuk mengetahui atau mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan anantara data observasi dengan data distrbusi yang mendekati distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari

grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

1). Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola yang berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data tersebut menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonalnya atau grafik histogram maka hasil tersebut tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Untuk melakukan pengujian normalitas dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametik *Kolmogorov-Smirnov* dalam program statistik tersebut dengan ketentuannya sebagai berikut :

1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka data terdistribusi dari model regresinya dikatakan data tersebut normal.

2) Jika Probabilitas $< 0,05$ maka data terdistribusi dari model regresinya dikatakan data tersebut tidak normal.

3.2.5.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas di dalam model regresi, peneliti menghitung nilai koefisien kolerasi antar variabel bebas dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai koefisien kolerasi antar variabel bebas $> 0,09$, maka terjadi masalah multikolinearitas.
- b. Jika nilai koefisien kolerasi antar variabel bebas $< 0,09$, maka terjadi masalah multikolinearitas.

Korelasi antara variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria yaitu :

- a. Jika angka tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika angka tolerance $< 0,1$ dan VIF > 10 dikatakan terjadi multikolinearitas.

Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari *Value Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 , maka model tersebut dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

3.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain (Ghozali 2016:134). Menurut Gunawan (2016:103) menyebutkan konsekuensi heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksiran yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel besar maupun dalam sampel kecil. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari semestinya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan model Glejser dilakukan dengan cara meregresikan semua variabel

bebas terhadap nilai mutlak dari nilai residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan kurang dari (0,05, $\alpha = 5\%$) terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika nilai mutlak residual melebihi nilai signifikan (0,05, $\alpha = 5\%$) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

$$|\hat{\mu}t| = \beta_1 + \beta_2 Salest + vt$$

$$|\hat{\mu}t| = \beta_1 + \beta_2 \sqrt{Salest + vt}$$

$$|\hat{\mu}t| = \beta_1 + \beta_2 \frac{1}{Salest} + vt$$

Sumber : (Ghozali, 2016)

3.2.5.4 Uji Autokolerasi

Menurut Ghozali (2016:107), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW *test*). Uji *Durbin-Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H₀: tidak ada autokorelasi ($\rho = 0$)

H_a: ada autokorelasi ($\rho \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kriteria Pengambilan Uji Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_U < d < 4 - d_U$

Ket: d_U *durbin watson upper*, d_L *durbin watson lower*

Sumber: Ghozali (2016)

- a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (d_U) dan $(4 - d_U)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (d_L), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol berarti, ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar daripada $(4 - d_L)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila DW terletak di antara batas atas (d_U) dan batas bawah (d_L) atau DW terletak antara $(4 - d_U)$ dan $(4 - d_L)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.2.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh nilai variabel terikat (Y) bila variabel bebas (X) diubah. Menurut Sekaran & Bougie (2017:138), menjelaskan bahwa analisis regresi digunakan dalam situasi dimana satu variabel bebas dihipotesiskan akan mempengaruhi satu variabel terikat.

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu analisis data dengan mengadakan perhitungan yang relevan dengan masalah yang dianalisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda.

Adapun bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda secara sistematis adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + + b_3X_3 + e$$

Y = Variabel Dependen Integritas Laporan Keuangan

a = Konstanta

b1-b2 = Slope atau arah garis regresi yang menyatakan perubahan nilai Y akibat perubahan 1 unit X

X₁ = Rasio Komisaris Independen

X₂ = Rasio Komite Audit

X₃ = Ukuran KAP

Dimana integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen sedangkan rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap sebagai variabel independen. Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, tentunya model tersebut harus bebas dari gejala asumsi klasik.

3.2.5.6 Analisis Koefisien Kolerasi

Menurut Kusumawati dkk. (2017:105), analisis koefisien korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Jika ada hubungan antara dua variabel maka perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lain. Besarnya korelasi berkisar $-1 \leq r \leq 1$.

Secara bersama-sama dengan satu variabel dependen. Rumus koefisien korelasi sebagai berikut:

$$r = \frac{(\sum x_1 y) + (\sum x_2 y)}{\sqrt{(\sum(x_1)^2 \sum(y)^2) + (\sum(x_2)^2 \sum(y)^2)}}$$

Sumber: Kusumawati, 2017

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

x = Variabel independen

y = Variabel dependen

Setelah mengetahui hasilnya, untuk menentukan keeratan korelasi antara variabel diberikan nilai-nilai koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
$-1,00 \leq r \leq -0,80$	Korelasi negatif kuat
$-0,79 \leq r \leq -0,50$	Korelasi negatif sedang
$-0,49 \leq r \leq -0,20$	Korelasi negatif lemah
$-0,19 \leq r < 0,00$	Korelasi negatif sangat lemah
$r = 0,00$	Tidak ada korelasi
$0,00 \leq r \leq 0,19$	Korelasi positif sangat lemah
$0,20 \leq r \leq 0,49$	Korelasi positif lemah
$0,50 \leq r \leq 0,79$	Korelasi positif sedang
$0,80 \leq r \leq 1,00$	Korelasi positif kuat

Sumber: Kusumawati, 2017

3.2.5.7 Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2017:55) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross-section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Adapun rumus untuk mencari koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Sumber: Ghozali, 2017

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi

3.2.6 Rancangan Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis ini, peneliti menetapkan dengan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak

ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan penyajian secara simultan (uji F). Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh variabel-variabel yaitu rasio komisaris independen, rasio komite audit dan ukuran kap terhadap integritas laporan keuangan.

a. Menentukan H_0 dan H_a secara parsial

1) Rasio Komisaris Independen

$H_{01} : \beta = 0$: Rasio Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan

$H_{a1} : \beta \neq 0$: Rasio Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan

2) Rasio Komite Audit

$H_{02} : \beta = 0$: Rasio Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan

$H_{a2} : \beta \neq 0$: Rasio Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan

3) Ukuran KAP

$H_{03} : \beta = 0$: Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan

$H_{a3} : \beta \neq 0$: Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan

b. Menentukan H_0 dan H_a secara simultan

$H_{03} : \beta = 0$: Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Integritas Laporan Keuangan

$H_{a3} : \beta \neq 0$: Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Integritas Laporan Keuangan

3.2.6.1 Uji F (Simultan)

Menurut Sugiyono (2016:171) Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan secara simultan.

Menurut Sugiyono (2016:171) rumus pengujiannya adalah:

$$F = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(N - K - 1)}$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien Determinasi

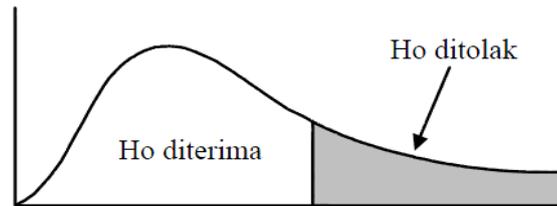
K : Jumlah variabel independen

N : Jumlah data atau kasus

F : Hasil perhitungan ini dibandingkan dengan Ftabel yang diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikan level 5% atau dengan degree freedom = n – k – 1 dengan kriteria sebagai berikut:

Ho ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$

Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$



Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Jika terjadi penerimaan Ho, maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

3.2.6.2 Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2016:171) mendefinisikan uji parsial sebagai uji yang digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennnya. Uji t digunakan dengan mengetahui nilai probabilitas signifikan t tiap-tiap variabel yang terdapat pada *output* hasil regresi.

Nilai probabilitas signifikan $t < 0,05$ maka dinyatakan ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan *Ho* ditolak atau *Ha* diterima dari hipotesis yang telah dirumuskan.

Guna mengetahui apakah secara parsial variabel independen bermakna,

dipergunakan uji t secara parsial dengan rumus:

$$t_{hitung} = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan:

t = nilai uji t

r = koefisien korelasi

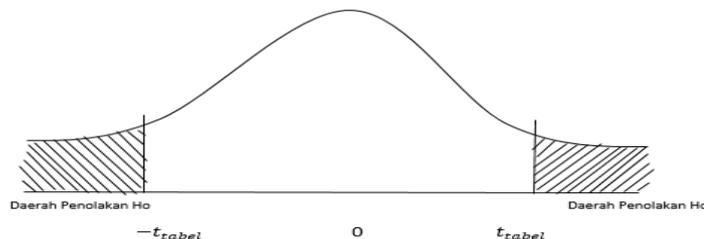
r^2 = koefisien determinasi

n = jumlah sampel yang diobservasi

Hasil perhitungan ini selanjutnya di bandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0.05. Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan sebagai berikut:

Ho diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > \alpha$

Ho ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$



Gambar 3.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan sebagai berikut:

(H_0) diterima apabila: $H_0 : \beta_j = 0$

(H_0) ditolak apabila: $H_a : \beta_j \neq 0$

Apabila H_0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel

independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan sebaliknya apabila H_0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung secara parsial, maka dihitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP secara parsial terhadap Integritas Laporan Keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan dan menganalisis mengenai “Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, Dan Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 Perusahaan, dengan teknik *purposive sampling* maka sampel akhir yang terpilih sebanyak 16 perusahaan dari seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2018. Berikut daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.1

Daftar Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	ADHI	Adhi Karya Tbk
2	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
3	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk
4	BBTN	Bank Tabungan Negara Tbk
5	BMRI	Bank Mandiri Tbk
6	JSMR	Jasa Marga Tbk

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
7	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk
8	GIAA	Garuda Indonesia Tbk
9	SMGR	Semen Indonesia Tbk
10	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk
11	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk
12	KAEF	Kimia Farma Tbk
13	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk
14	KRAS	Krakatau Steel Tbk
15	SMBR	Semen Baturjaya Tbk
16	PPRO	PT Properti Tbk

Sumber : Data diolah, 2019

Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif mengenai perkembangan masing-masing variabel yang diteliti dan kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya rasio komisaris independen yang diukur dengan proporsi dari dewan komisaris independen, rasio komite audit yang diukur dengan proporsi anggota komite audit dari luar perusahaan, dan ukuran kap yang diukur dengan jasa *big four*, serta integritas laporan keuangan yang diukur dengan prinsip konservatisme menggunakan *accrual measure* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

4.1.1 Perkembangan Rasio Komisaris Independen pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Menurut S.R. Soemarso (2018:287) komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya, serta dewan komisaris independen melakukan pengawasan terhadap manajemen perihal operasional perusahaan.

Komisaris independen dalam struktur perusahaan diharapkan menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan dalam upaya memberikan perlindungan bagi para pemegang saham minoritas, serta para pemangku kepentingan yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen memiliki tugas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem kontrol, dan sistem audit dapat berjalan dengan baik. Memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disajikan berintegritas tinggi dan andal dalam proses pengambilan keputusan (Pradika dan Hoesada, 2018).

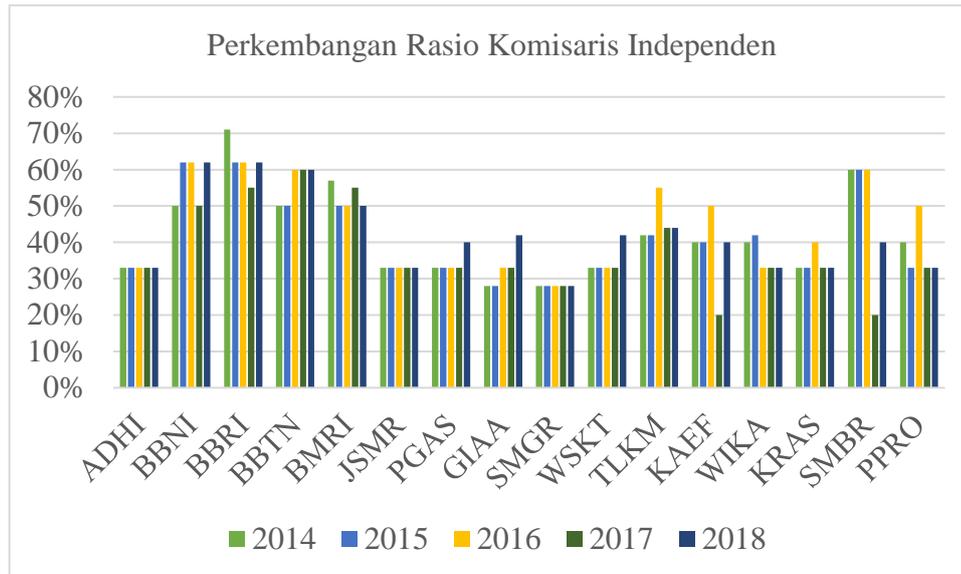
Berikut disajikan data mengenai gambaran rasio komisaris independen pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

Tabel 4.2
Perkembangan Rasio Komisaris Independen pada Perusahaan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Tahun 2014-2018.
(%)

No	Kode Perusahaan	Tahun					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	ADHI	33%	33%	33%	33%	33%	33.00%
2	BBNI	50%	62%	62%	50%	62%	57.20%
3	BBRI	71%	62%	62%	55%	62%	62.40%
4	BBTN	50%	50%	60%	60%	60%	56.00%
5	BMRI	57%	50%	50%	55%	50%	52.40%
6	JSMR	33%	33%	33%	33%	33%	33.00%
7	PGAS	33%	33%	33%	33%	40%	34.40%
8	GIAA	28%	28%	33%	33%	42%	32.80%
9	SMGR	28%	28%	28%	28%	28%	28.00%
10	WSKT	33%	33%	33%	33%	42%	34.80%
11	TLKM	42%	42%	55%	44%	44%	45.40%
12	KAEF	40%	40%	50%	20%	40%	38.00%
13	WIKA	40%	42%	33%	33%	33%	36.20%
14	KRAS	33%	33%	40%	33%	33%	34.40%
15	SMBR	60%	60%	60%	20%	40%	48.00%
16	PPRO	40%	33%	50%	33%	33%	37.80%
Rata-Rata		41.94%	41.38%	44.69%	37.25%	42.19%	41.49%
Maksimum		71%	62%	62%	60%	62%	62.40%
Minimum		28%	28%	28%	20%	28%	28.00%

Data diolah dari Laporan Keuangan, 2019

Pada tabel 4.2 diatas memperlihatkan perkembangan rasio komisaris independen dan rata-rata perkembangan rasio komisaris independen dari masing-masing perusahaan, agar dapat terlihat dengan jelas maka ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Rasio Komisaris Independen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.
(Sumber : data diolah, 2019)

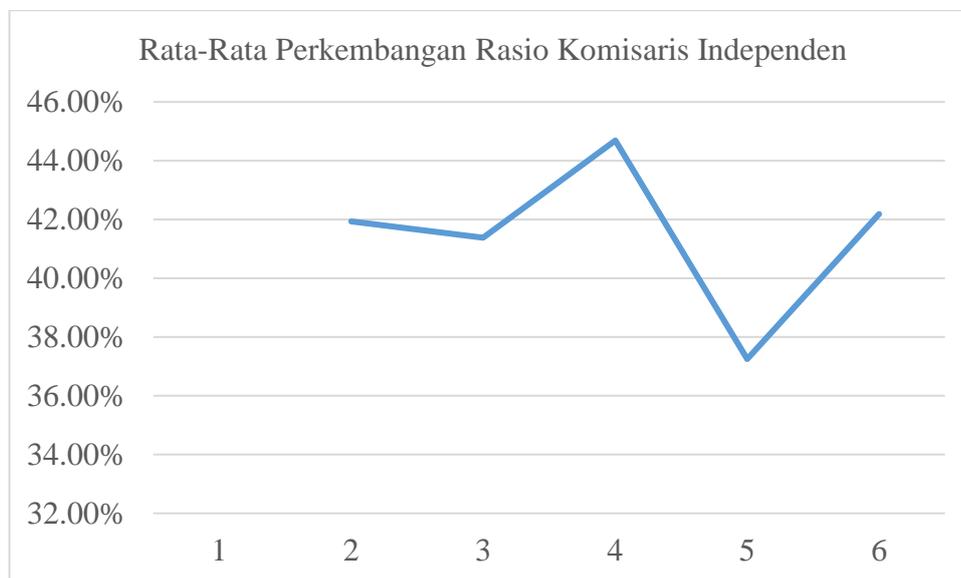
Berdasarkan data tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa rasio komisaris independen yang diprosikan dengan jumlah proporsi komisaris independen setiap perusahaan berfluktuasi. Dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan yang memiliki nilai rata-rata proporsi komisaris independen tertinggi adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yaitu sebesar 62,4% dan nilai rata-rata terkecil dimiliki oleh PT. Semen Indonesia Tbk (SMGR) dan PT. sebesar 28%. Dengan nilai rasio komisaris independen yang tinggi berarti bahwa peran komisaris independen berjalan dengan baik menyeimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas serta untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dalam mengawasi kinerja dan kepengurusan perseroan, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Komisaris independen sendiri bertugas untuk mengatur jalannya operasional perusahaan seperti mengawasi pihak manajemen dalam melakukan pembuatan laporan keuangan. Dari ke-16 perusahaan tersebut bahwa hampir semua

dari perusahaan BUMN memiliki rata-rata persentase proporsi komisaris independen kurang lebih 30% sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.33/PJOK.04/2014. Secara lebih jelas, gambaran mengenai rasio komisaris independen dari tahun 2014 sampai 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014, dari 16 perusahaan tersebut, perusahaan dengan rasio komisaris independen tertinggi adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar 71% sedangkan perusahaan dengan proporsi rasio komisaris independen terendah tahun 2014 adalah PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT. Semen Indonesia Tbk (SMGR) sebesar 28%.
2. Pada tahun 2015 dari 16 perusahaan tersebut maka perusahaan dengan proporsi rasio komisaris independen tertinggi adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar 62% sedangkan perusahaan dengan proporsi rasio komisaris independen terendah tahun 2015 adalah PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT. Semen Indonesia Tbk (SMGR) sebesar 28%.
3. Pada tahun 2016 dari 16 perusahaan tersebut maka perusahaan dengan proporsi rasio komisaris independen tertinggi adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar 62% sedangkan perusahaan dengan proporsi rasio komisaris independen terendah tahun 2016 adalah PT. Semen Indonesia Tbk (SMGR) sebesar 28%.
4. Pada tahun 2017 dari 16 perusahaan tersebut maka perusahaan dengan proporsi rasio komisaris independen tertinggi adalah PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebesar 60% sedangkan perusahaan dengan proporsi rasio komisaris

independen terendah tahun 2017 adalah PT. Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT. Semen Baturjaja Tbk (SMBR) sebesar 20%.

5. Pada tahun 2018 dari 16 perusahaan tersebut maka perusahaan dengan proporsi rasio komisaris independen tertinggi adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar 62% sedangkan perusahaan dengan rasio komisaris independen terendah tahun 2018 adalah PT. Semen Indonesia Tbk (SMGR) sebesar 28%.



Gambar 4.2 Rata-rata Perkembangan Rasio Komisaris Independen Per Tahun Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.

(Sumber : Data diolah,2019)

Grafik diatas menunjukkan rata-rata rasio komisaris independen per tahun pada tahun 2014-2018 di 16 perusahaan yang diukur dengan proporsi komisaris independen, terlihat bahwa secara keseluruhan rata-rata rasio komisaris independen setiap tahunnya berfluktuasi. Rata-rata rasio komisaris independen di tahun 2014 sebesar 41,94% yang mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 41,38% dari 41,94% di tahun 2014, sedangkan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar

3,31% menjadi 44,69%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 7,44% menjadi 37,25%. Lalu mengalami kenaikan yang terjadi pada tahun 2018 dari tahun 2017 sebesar 4,94% menjadi 42,19%. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang memiliki rasio komisaris independen tertinggi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yaitu dengan rata-rata 62,4%, jumlah proporsi rasio komisaris independen PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) melebihi batas aturan yang berlaku yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah dewan komisaris.

4.1.2 Perkembangan Rasio Komite Audit pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) N0.55/PJOK.04/2015 memaparkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Seorang komite audit harus bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dimana setiap perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 (tiga) orang yang diketui 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode berikutnya. Pembentukan komite audit bertujuan membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam hal melakukan pengawasan

secara menyeluruh, memeriksa laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, memastikan bahwa internal kontrol perusahaan berjalan dengan baik, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan tujuan pembentukan komite audit maka akan mempengaruhi kualitas dan integritas laporan keuangan yang dibuat perusahaan (Wirama dkk, 2016).

Berikut disajikan data mengenai gambaran rasio komite audit pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

Tabel 4.3
Perkembangan Rasio Komite Audit pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018.

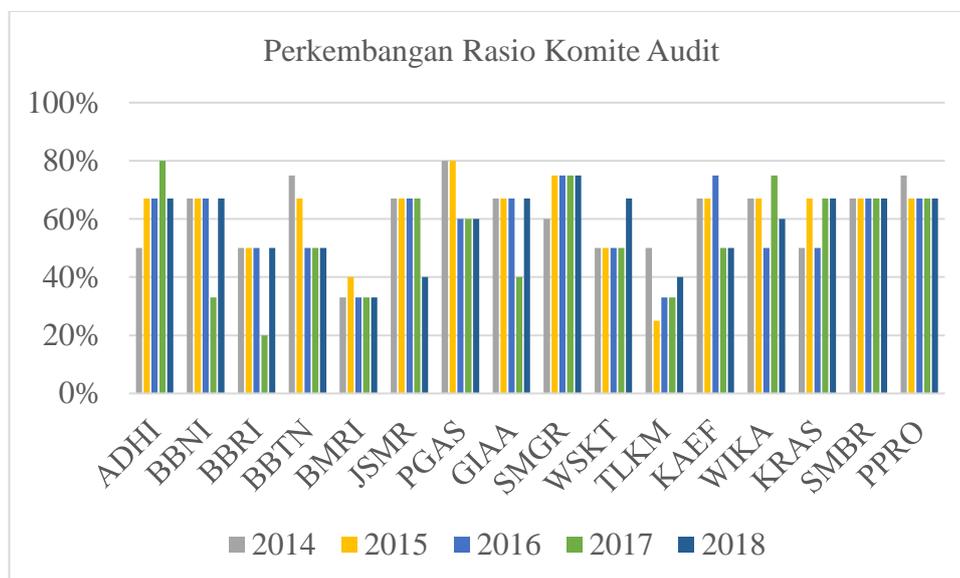
(%)

No	Kode Perusahaan	Tahun					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	ADHI	50%	67%	67%	80%	67%	66.20%
2	BBNI	67%	67%	67%	33%	67%	60.20%
3	BBRI	50%	50%	50%	20%	50%	44.00%
4	BBTN	75%	67%	50%	50%	50%	58.40%
5	BMRI	33%	40%	33%	33%	33%	34.40%
6	JSMR	67%	67%	67%	67%	40%	61.60%
7	PGAS	80%	80%	60%	60%	60%	68.00%
8	GIAA	67%	67%	67%	40%	67%	61.60%
9	SMGR	60%	75%	75%	75%	75%	72.00%
10	WSKT	50%	50%	50%	50%	67%	53.40%
11	TLKM	50%	25%	33%	33%	40%	36.20%
12	KAEF	67%	67%	75%	50%	50%	61.80%
13	WIKA	67%	67%	50%	75%	60%	63.80%
14	KRAS	50%	67%	50%	67%	67%	60.20%
15	SMBR	67%	67%	67%	67%	67%	67.00%
16	PPRO	75%	67%	67%	67%	67%	68.60%
Rata-Rata		60.94%	61.88%	58.00%	54.19%	57.94%	58.59%

No	Kode Perusahaan	Tahun					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
	Maksimum	80%	80%	75%	80%	75%	72.00%
	Minimum	33%	25%	33%	20%	33%	34.40%

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan, 2019

Pada tabel 4.3 diatas memperlihatkan perkembangan rasio komite audit dan rata-rata perkembangan rasio komite audit dari masing-masing perusahaan, agar dapat terlihat dengan jelas maka ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 4.3 Grafik Perkembangan Rasio Komite Audit Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018.

(Sumber : Data diolah, 2019)

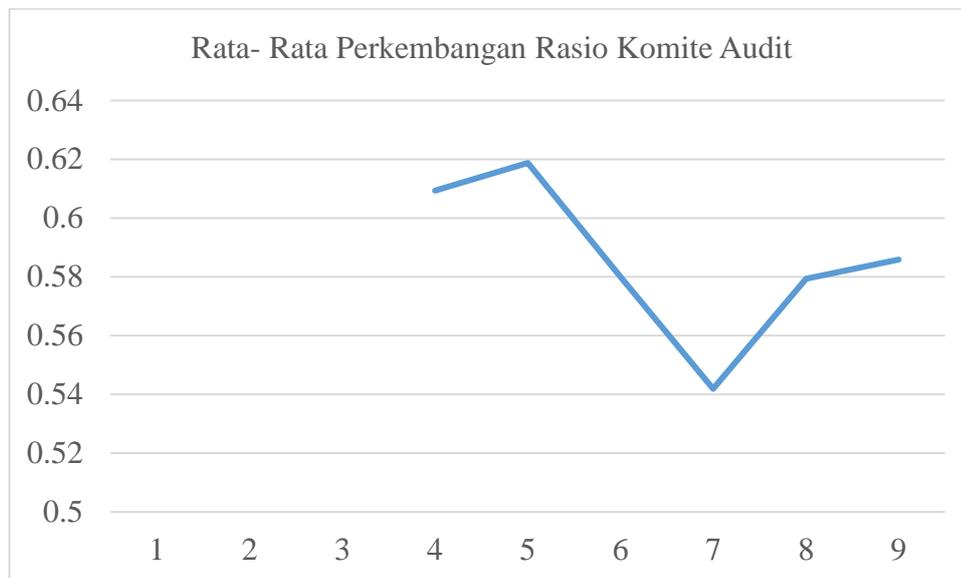
Berdasarkan data tabel 4.3 dan gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa rasio komite audit yang diprosikan dengan proporsi anggota komite audit dari luar perusahaan setiap perusahaan berfluktuasi. Dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan yang memiliki nilai rata-rata rasio komite audit tertinggi adalah PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) yaitu sebesar 72% dan nilai rata-rata terkecil dimiliki oleh PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) yaitu sebesar 34,4%. Dengan nilai

rasio komite audit yang tinggi maka tugas dan wewenang komite audit berjalan dengan baik, fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan yang akan disajikan ke publik berjalan dengan standar dari perusahaan yang bersangkutan, memiliki sikap independen dan integritas yang tinggi apabila perusahaan memiliki komite audit yang banyak, serta fungsi pengawasan terhadap audit eksternal sangat bagus. Secara lebih jelas, perkembangan rasio komite audit dari tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014, dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan dengan rasio komite audit tertinggi adalah PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebesar 80% sedangkan perusahaan dengan rasio komite audit terendah tahun 2014 adalah PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) sebesar 33%.
2. Pada tahun 2015, dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan dengan rasio komite audit tertinggi adalah PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebesar 80% sedangkan perusahaan dengan rasio komite audit terendah tahun 2015 adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar 25%.
3. Pada tahun 2016, dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan dengan rasio komite audit tertinggi adalah PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) dan PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF) sebesar 75% sedangkan perusahaan dengan rasio komite audit terendah tahun 2016 adalah PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar 33%.
4. Pada tahun 2017 dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan dengan rasio komite audit tertinggi adalah PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) sebesar 80% sedangkan perusahaan dengan rasio komite audit terendah tahun 2017 adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar 20%.

5. Pada tahun 2018 dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan dengan rasio komite audit tertinggi adalah PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar 75% sedangkan perusahaan dengan rasio komite audit terendah tahun 2018 adalah PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) sebesar 33%.

Untuk mengetahui rata-rata perkembangan rasio komite audit per tahun maka akan ditampilkan dalam gambar



Gambar 4.4 Rata-rata Perkembangan Rasio Komite Audit Per Tahun Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.

(Sumber : Data diolah, 2019)

Grafik diatas menunjukkan rata-rata perkembangan rasio komite audit per tahun dari 16 perusahaan yang diukur dengan proporsi anggota komite audit dari luar perusahaan, terlihat bahwa secara keseluruhan rata-rata rasio komite audit setiap tahunnya berfluktuasi. Rata-rata rasio komite audit di tahun 2014 sebesar 60,94% yang mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 0,94% menjadi 61,88%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 3,88% menjadi 58%, untuk tahun 2017 juga mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar

3,81% menjadi 54,19%. Lalu untuk tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,75% menjadi 57,94%.

4.1.3 Perkembangan Ukuran KAP pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Menurut Fung dan Gul (2014:20) menyatakan bahwa kantor akuntan publik yang melakukan praktik akuntan publik bervariasi ukurannya. Firma yang tergolong dalam *the big four* maupun *non the big four*, tetapi ada beberapa kekhawatiran dikalangan akademis dan yang lainnya bahwa kantor akuntan publik dengan menyediakan layanan non audit untuk kliennya dapat mempengaruhi persepsi publik tentang independensi auditor.

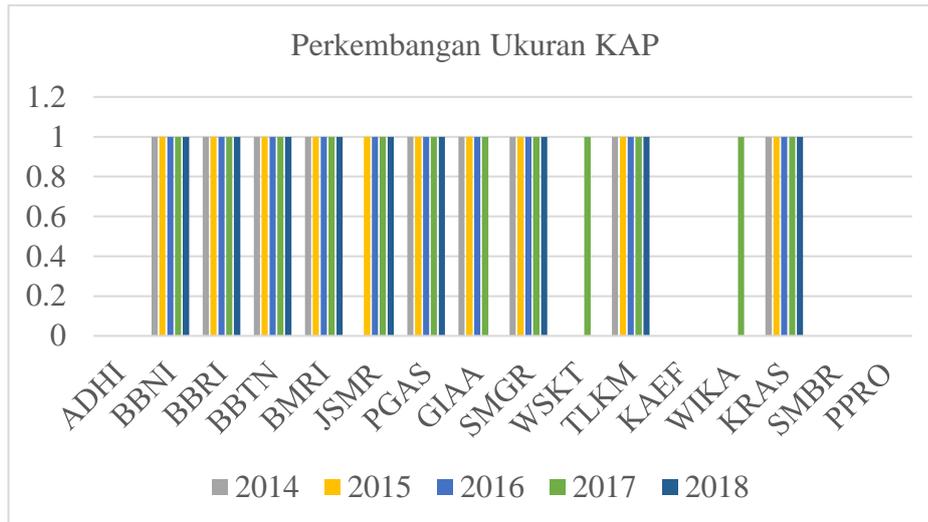
Ukuran KAP yang diukur dengan jasa akuntan publik KAP *big four* apabila menggunakan jasa KAP *bigfour* 1 dan tidak menggunakan jasa KAP *big four* 0 karena bahwa KAP besar mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Berikut ini adalah data Ukuran KAP pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Tabel 4.4
Perkembangan Ukuran KAP pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018.

No	Kode Perusahaan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	ADHI	0	0	0	0	0
2	BBNI	1	1	1	1	1
3	BBRI	1	1	1	1	1
4	BBTN	1	1	1	1	1
5	BMRI	1	1	1	1	1
6	JSMR	0	1	1	1	1
7	PGAS	1	1	1	1	1
8	GIAA	1	1	1	1	0
9	SMGR	1	1	1	1	1
10	WSKT	0	0	0	1	0
11	TLKM	1	1	1	1	1
12	KAEF	0	0	0	0	0
13	WIKA	0	0	0	1	0
14	KRAS	1	1	1	1	1
15	SMBR	0	0	0	0	0
16	PPRO	0	0	0	0	0
KAP <i>The Big Four</i>		9	10	10	12	9
KAP <i>Non The Big Four</i>		7	6	6	4	7

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan, 2019

Pada tabel 4.4 diatas memperlihatkan gambaran mengenai ukuran kap yang menggunakan jasa KAP *Big Four* dari masing-masing agar dapat terlihat dengan jelas maka ditampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Ukuran KAP Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.
(Sumber: data diolah, 2019)

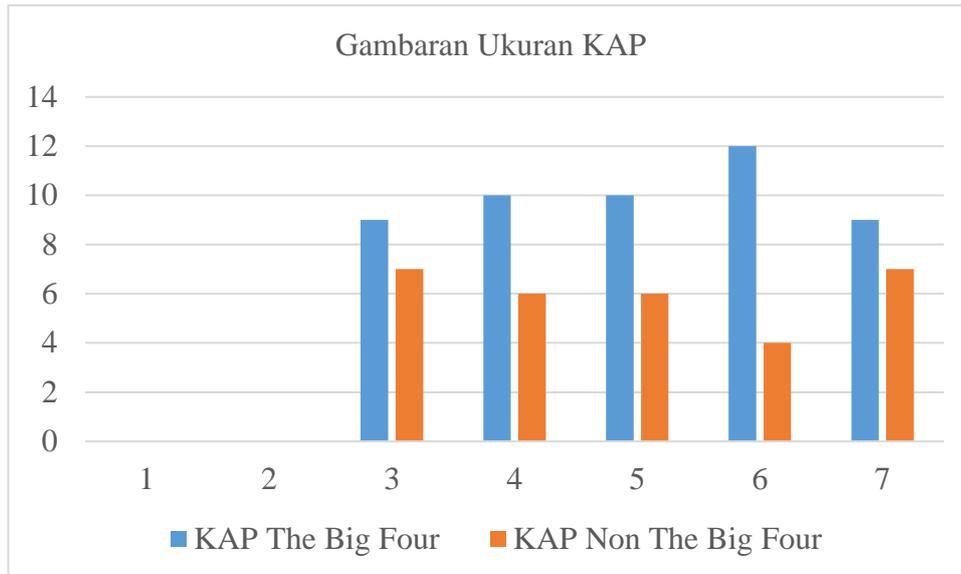
Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa ukuran kap yang dikur dengan jasa KAP *Big Four* beberapa perusahaan ada yang menggunakan jasa *big four* dan sebagian tidak menggunakan jasa KAP *Big Four*. Dari ke-16 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik masih ada beberapa perusahaan yang tidak menggunakan jasa akuntan publik *big four*. Secara lebih jelas, gambaran perkembangan ukuran kap dari tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014, dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan yang tidak menggunakan jasa akuntan publik *big four* adalah perusahaan PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR). PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT. Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR), dan PT. PP Properti Tbk (PPRO).
2. Pada tahun 2015, dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan yang tidak menggunakan jasa akuntan publik *big four* adalah perusahaan PT. Adhi Karya

Tbk. (ADHI), PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT. Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR), dan PT. PP Properti Tbk (PPRO).

3. Pada tahun 2016, dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan yang tidak menggunakan jasa akuntan publik *big four* adalah perusahaan PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI), Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT. Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR), dan PT. PP Properti Tbk (PPRO).
4. Pada tahun 2017, dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan yang tidak menggunakan jasa akuntan publik *big four* adalah perusahaan PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR), dan PT. PP Properti Tbk (PPRO).
5. Pada tahun 2018, dari ke-16 perusahaan tersebut, perusahaan yang tidak menggunakan jasa akuntan publik *big four* adalah perusahaan PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT. Garuda Indonesia Tbk, (GIAA), Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT. Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR), dan PT. PP Properti Tbk (PPRO).

Untuk mengetahui rata-rata perkembangan ukuran kap per tahun yang menggunakan jasa *big four* maka akan ditampilkan dalam gambar 4.6 berikut :



Gambar 4.6 Ukuran KAP Per Tahun Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.

(Sumber: data diolah, 2019)

grafik diatas menunjukkan ukuran kap per tahun di 16 perusahaan yang diukur dengan jasa KAP *big four*, terlihat bahwa secara keseluruhan ukuran KAP secara 5 (lima) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2014 perusahaan yang menggunakan jasa KAP *the big four* sebanyak 9 perusahaan dan 7 perusahaan menggunakan jasa KAP *non the big four*, tahun 2015 dan 2016 perusahaan yang menggunakan KAP *the big four* sebanyak 10 perusahaan dan 6 perusahaan menggunakan KAP *non the big four*. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 12 perusahaan menggunakan KAP *the big four* dan 4 perusahaan menggunakan KAP *non the big four*. Pada tahun 2018 ada 9 perusahaan menggunakan KAP *the big four* dan 7 perusahaan menggunakan KAP *non the big four*.

4.1.4 Perkembangan Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Integritas laporan keuangan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Integritas laporan keuangan diukur dengan menggunakan pengukuran prinsip konservatisme. Karena dengan menggunakan prinsip konservatisme laporan keuangan yang akan dibuat memiliki kehandalan dan berintegritas yang tinggi. Menurut Rossi (2014:206) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan dan bagian akuntansi harus diperhatikan dengan benar untuk menilai ke integritasan laporan keuangan tersebut serta perusahaan lebih memperhatikan praktik pelaporan dengan baik agar pihak audit internal melakukan pemrosesan tugas berjalan dengan lancar tanpa menemukan adanya indikasi temuan dalam pelaporan keuangannya.

Integritas laporan keuangan diukur dengan prinsip konservatisme dikarenakan bahwa suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam hal prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian laporan keuangan yang memiliki nilai relevan dan andal. Prinsip konservatisme merupakan prinsip penilaian akuntansi yang dari dulu bertahan hingga saat ini, hal ini menekankan pada penyajian objektif dan adil.

Pengukuran integritas laporan keuangan menggunakan model peneliti Givoy dan Hayn (2000) agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hal ini dikarenakan Pengukuran konservatisme dengan *earning/accrual measure* yaitu mengukur dengan melihat kecenderungan dari akumulasi akrual selama beberapa tahun. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Berikut ini adalah data

integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik pada tahun 2014-2018.

Tabel 4.5

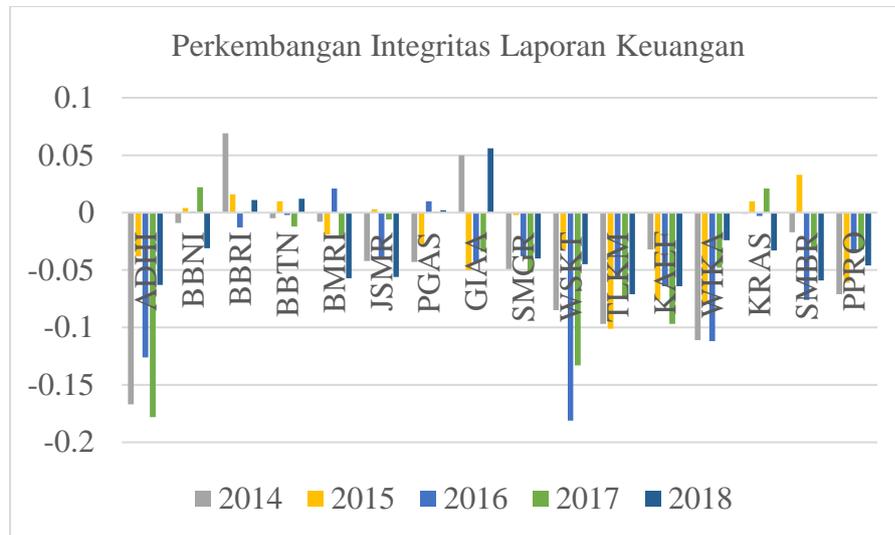
Perkembangan Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018.

No	Kode Perusahaan	Tahun					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	ADHI	-0.167	-0.038	-0.126	-0.178	-0.063	-0.1144
2	BBNI	-0.009	0.004	0.001	0.022	-0.031	-0.0026
3	BBRI	0.069	0.016	-0.013	0.001	0.011	0.0168
4	BBTN	-0.005	0.010	-0.002	-0.012	0.012	0.0006
5	BMRI	-0.008	-0.019	0.021	-0.021	-0.057	-0.0168
6	JSMR	-0.042	0.003	-0.039	-0.006	-0.056	-0.028
7	PGAS	-0.043	-0.028	0.010	0.001	0.002	-0.0116
8	GIAA	0.050	-0.050	-0.043	-0.034	0.056	-0.0042
9	SMGR	-0.049	-0.002	-0.038	-0.052	-0.040	-0.0362
10	WSKT	-0.085	-0.032	-0.181	-0.133	-0.045	-0.0952
11	TLKM	-0.097	-0.101	-0.058	-0.075	-0.071	-0.0804
12	KAEF	-0.032	-0.076	-0.064	-0.097	-0.064	-0.0666
13	WIKA	-0.111	-0.079	-0.112	-0.048	-0.024	-0.0748
14	KRAS	-0.001	0.010	-0.003	0.021	-0.033	-0.0012
15	SMBR	-0.017	0.033	-0.076	-0.031	-0.059	-0.03
16	PPRO	-0.071	-0.061	-0.035	-0.032	-0.046	-0.049
	Rata-Rata	-0.0386	-0.0256	-0.0474	0.0421	0.0318	-0.0371
	Maksimum	0.069	0.033	0.021	0.022	0.056	0.0402
	Minimum	-0.167	-0.101	-0.181	-0.178	-0.071	-0.1396

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan, 2019

Dari tabel 4.5 diatas memperlihatkan akrual dari masing-masing perusahaan dan rata-rata akrual yang menggambarkan konservatisme serta untuk terciptanya penyajian ke integritasan laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan dengan standar yang diterima secara umum dari 16 perusahaan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Agar dapat terlihat dengan jelas maka ditampilkan dalam grafik berikut ini :



Gambar 4.7 Grafik Perkembangan Integritas Laporan Keuangan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.

(Sumber: Data diolah, 2019)

Berdasarkan data pada tabel 4.5 dan grafik pada gambar 4.7 diatas, maka dapat diketahui bahwa integritas laporan keuangan yang diukur dengan prinsip konservatisme setiap perusahaan berfluktuasi. Perusahaan yang memiliki rata-rata penerapan integritas laporan keuangan tertinggi diperoleh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) yaitu sebesar 0,0168 dan penerapan ke integritasan dalam penyajian laporan keuangan terendah diperoleh PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) yaitu sebesar -0,1144 pada perusahaan tersebut. Secara lebih jelas, perkembangan ke integritasan penyajian laporan keuangan dari tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014, perusahaan yang memiliki ke integritasan tinggi dalam penyajian laporan keuangan terdiri dari 2 perusahaan, perusahaan tersebut

adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar 0,069 dan perusahaan PT. Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sebesar 0,050. Pada tahun 2014 perusahaan yang memiliki ke integritasan dalam penyajian laporan keuangan hanya 2 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki ke integritasan dalam penyajian laporan keuangan terdiri dari 14 perusahaan, perusahaan tersebut meliputi PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) sebesar -0,167, PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) sebesar -0,009, PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) sebesar -0,005, PT. Bank Mandiri sebesar -0,008, PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR) sebesar -0,042, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebesar -0,043, PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar -0,049, PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT) sebesar -0,085, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar -0,097, PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF) sebesar -0,032, PT. Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebesar -0,111, PT. Krakatau Steel Tbk. (KRAS) sebesar -0,001, PT. Semen Baturjaja Tbk (SMBR) sebesar -0,017, PT. PP Properti Tbk. (PPRO) sebesar -0,071.

2. Pada tahun 2015 perusahaan yang memiliki ke integritasan dalam laporan keuangannya terdiri dari 6 perusahaan meliputi PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) sebesar 0,004, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar 0,016, PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) sebesar 0,010, PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR) sebesar 0,003, PT. Krakatau Steel Tbk. (KRAS) sebesar 0,010, PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR) sebesar 0,033, sedangkan untuk perusahaan dengan nilai integritas laporan keuangan rendah yaitu terdiri dari 10 perusahaan meliputi PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) sebesar -0,038, PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) sebesar -0,019, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

(PGAS) sebesar -0,028, PT. Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sebesar -0,050, PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar -0,002, PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT) sebesar -0,032, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar 0,101, PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF) sebesar -0,076, PT. Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebesar -0,079, PT. PP Properti Tbk. (PPRO) sebesar -0,061.

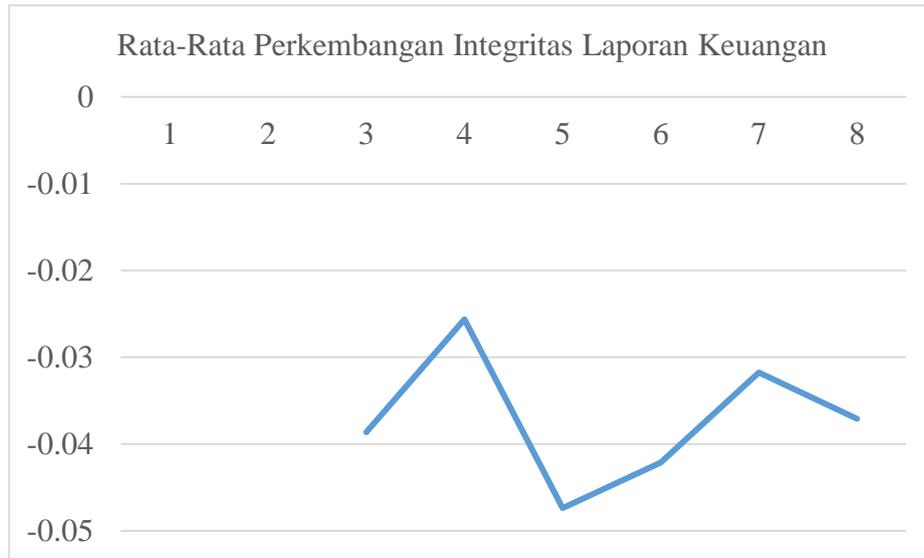
3. Pada tahun 2016 perusahaan yang menerapkan ke integritas laporan keuangan yang tinggi terdapat 3 perusahaan meliputi PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) sebesar 0,001, PT. Bank Mandiri sebesar 0,021, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebesar 0,010. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki integritas rendah terdiri dari 13 perusahaan meliputi PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) sebesar -0,126, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar -0,013, PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) sebesar -0,002, PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR) sebesar -0,039, PT. Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sebesar -0,043, PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar -0,038, PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT) sebesar -0,181, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar -0,058, PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF) sebesar -0,064, PT. Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebesar -0,112, PT. Krakatau Steel Tbk. (KRAS) sebesar -0,003, PT. Semen Baturjaya Tbk. (SMBR) sebesar -0,076, PT. PP Properti Tbk. (PPRO) sebesar -0,035.

4. Pada tahun 2017 perusahaan yang menerapkan ke integritas laporan keuangan terdiri dari 4 perusahaan yang meliputi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar 0,001, PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) sebesar 0,022, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebesar 0,001, PT. Krakatau Steel Tbk. (KRAS) sebesar 0,021. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki nilai

integritas yang rendah terdiri dari 12 perusahaan meliputi PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) sebesar -0,178, PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) sebesar -0,012, PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) sebesar -0,021, PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR) sebesar -0,006, PT. Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sebesar -0,034, PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar -0,052, PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT) sebesar -0,133, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar -0,075, PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF) sebesar -0,097, PT. Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebesar -0,048, PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR) sebesar -0,031, PT. PP Properti Tbk. (PPRO) sebesar -0,032.

5. Pada tahun 2018 perusahaan yang menerapkan nilai ke integritas laporan keuangan yang tinggi terdiri dari 4 perusahaan yang meliputi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar 0,011, PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) sebesar 0,012, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebesar 0,002, PT. Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sebesar 0,056. Sedangkan untuk perusahaan dengan nilai terendah ke integritas laporan keuangan terdiri dari 12 perusahaan antara lain PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) sebesar -0,063, PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) sebesar -0,031, PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) sebesar -0,057, PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR) sebesar -0,056, PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar -0,040, PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT) sebesar -0,045, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar -0,071, PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF) sebesar -0,033, PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR) sebesar -0,059, PT. PP Properti Tbk. (PPRO) sebesar -0,046.

Untuk mengetahui rata-rata perkembangan integritas laporan keuangan per tahun yang maka akan ditampilkan dalam gambar 4.8 berikut :



Gambar 4.8 Rata-rata Perkembangan Integritas Laporan Keuangan Per Tahun Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018.
(Sumber: data diolah, 2019)

Grafik diatas menunjukkan rata-rata perkembangan integritas laporan keuangan per tahun di 16 perusahaan yang diukur dengan prinsip konservatisme, terlihat bahwa secara keseluruhan rata-rata integritas laporan keuangan setiap tahunnya berfluktuasi. Rata-rata integritas laporan keuangan di tahun 2014 sebesar -0,0386 dan mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 0,013 menjadi -0,0256. Sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar -0,0218 menjadi -0,0474. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,0053 lalu juga mengalami penurunan untuk di tahun 2018 sebesar 0,0103 menjadi -0,0318.

Adapun gambaran mengenai hasil statistik deskriptif dari variabel rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap. Statistik deskriptif memberikan gambaran data dari hasil penelitian dengan pendekatan tabel statistik

berdasarkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, standar deviasi, *skewness*, dan *kurtois*. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Hasil Analisis Deskriptif

	RASIO KOMISARIS INDEPENDEN	RASIO KOMITE AUDIT	UKURAN KAP	INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN
Mean	0,4149	0,5859	0,63	-0,03710
Median	0,4000	0,6700	1,00	-0,03350
Maximum	0,71	0,80	1	0,069
Minimum	0,20	0,20	0	-0,181
Std. Dev.	0,11950	0,14136	0,487	0,049065
Skewness	0,585	-0,759	-0,526	-0,728
Kurtosis	-0,744	-0,230	-1,768	1,020

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan hasil pengujian statistik deskriptif yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Rasio Komisaris Independen

Menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4149 dengan median 0,4000 yang berarti variabel rasio komisaris independen cenderung tinggi. Nilai maksimum sebesar 0,71 berada pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tahun 2014. Nilai minimum sebesar 0,20 berada pada PT. Semen Baturjaja Tbk (SMBR) tahun 2017. Nilai standar deviasi sebesar 0,11950. Nilai *skewness* sebesar 0,585. Nilai *kurtois* sebesar -0,744.

2. Variabel Rasio Komite Audit

Menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,5859 dengan median 0,6700 yang berarti rasio komite audit cenderung tinggi. Nilai maksimum sebesar 0,80 berada pada PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada tahun 2014 dan 2015, PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) di tahun 2017. Nilai minimum sebesar 0,20

berada pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI). Nilai standar deviasi sebesar 0,14136. Nilai *skewness* sebesar -0,759. Nilai *kurtois* sebesar -0,230.

3. Variabel Ukuran KAP

Menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar 0,63 dengan median 1,00 yang berarti ukuran kap cenderung tinggi. Serta beberapa perusahaan menggunakan jasa *big four* sedangkan perusahaan PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR), PT. PP Properti Tbk. (PPRO) tidak menggunakan jasa *Non The Big Four*. Nilai standar deviasi sebesar 0,0487. Nilai *skewness* sebesar -0,526. Nilai *kurtois* sebesar -1,768

4. Variabel Integritas Laporan Keuangan

Menunjukkan rata-rata (*mean*) sebesar -0,03710 dengan median -0,03350 yang berarti Integritas Laporan Keuangan cenderung tinggi. Nilai maksimum sebesar 0,069 berada pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Nilai minimum sebesar -0,181 berada pada PT. Waskita Karya Tbk (WSKT). Nilai standar deviasi sebesar 0,049065. Nilai *skewness* sebesar -0,728. Nilai *kurtois* sebesar 1,020.

4.1.5 Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Pengujian pengaruh antar variabel menggunakan pengujian analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan pengujian antar variabel, data yang digunakan

dalam penelitian harus dipastikan lolos dari uji kelayakan. Menurut Ghozali (2016) uji kelayakan dilakukan dengan uji asumsi klasik.

4.1.5.1 Uji Asumsi Klasik (Uji Kelayakan)

Uji asumsi klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, guna menjawab hipotesis penelitian. Pengukuran yang digunakan yaitu uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan uji autokolerasi.

a. Pengujian Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan nilai *residual* mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik, tetapi peneliti menggunakan analisis statistik.

a. Analisis Statistik

Uji Normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati, secara visual data terlihat normal akan tetapi secara statistik dapat berupa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan selain menggunakan uji grafik dilengkapi juga dengan menggunakan uji statistik. Untuk uji normalitas selanjutnya digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Komolgorov-Smirnov Test*, dengan ketentuan jika *Komolgorov-Smirnov* dihitung lebih besar dari 0,05 maka sebaran data dikatakan mendekati distribusi normal, sebaliknya jika

Kolmogorv-Smirnov lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04019630
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.046
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel 4.7 menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

b. Pengujian Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi yang tinggi atau antara variabel independen (bebas). Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi kolerasi antara variabel independen (bebas). Adanya multikolinearitas atau kolerasi yang tinggi antar variabel independen (bebas) dapat dideteksi dengan cara *Tolerance* dan *Variance*

Inflation Factor (VIF). *Tolerance* mengukur variabel bebas yang terpilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali 2011:105). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari *Value Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Rasio Komisaris Independen	,877	1,140
	Rasio Komite Audit	,843	1,187
	Ukuran KAP	,903	1,107

a. Dependent Variable: Integritas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel bebas memiliki nilai < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varian variabel pada model regresi memiliki kesamaan (konstan). Model regresi yang baik adalah model

regresi yang memiliki kesamaan (homokedastisitas). Uji heteroskedastisitas menggunakan model Glejser dilakukan dengan cara meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak dari nilai residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan ($0,05$, $\alpha = 5\%$) terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika nilai mutlak residual melebihi nilai signifikan ($0,05$, $\alpha = 5\%$) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients		
Model		Sig.
1	(Constant)	,002
	Rasio Komisaris Independen	,216
	Rasio Komite Audit	,300
	Ukuran KAP	,083

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa pada model regresi tersebut adalah model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat disimpulkan dari nilai Sig. Variabel Rasio Komisaris Independen terhadap absolut nilai residual sebesar $0,216 > 0,05$, Sig. Variabel Rasio Komite Audit terhadap absolut residual sebesar $0,300 > 0,05$, lalu untuk Ukuran KAP nilai Sig. Variabel Ukuran KAP tersebut absolut terhadap absolut residualnya $0,083 > 0,05$.

d. Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW *test*). Uji *Durbin-Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocerlation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watsin
1	,573 ^a	,329	,302	,040982	1,782

- a. Predictors:(Constant),Rasio_Komisaris_Independen,Rasio_Komite_Audit, Ukuran_KAP
- b. Dependent Variabel: Integritas_laporan_keuangan

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji autokorelasi dengan uji *Durbin Watson* menunjukkan nilai sebesar 1,782, dari nilai tersebut menunjukkan bahwa DW berada diantara Du yakni $dU (1,7430) < DW (1,782) < 4- dU (4-1,7430 = 2,257)$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Artinya bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terganggu atau terpengaruhi oleh variabel pengganggu.

4.1.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Adapun hasil regresi linier berganda ditunjukkan dalam tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,175	,032		-5,468	,000
	Rasio Komisaris Independen	,147	,041	,359	3,580	,001
	Rasio Komite Audit	,084	,036	,241	2,352	,021
	Ukuran KAP	,044	,010	,439	4,442	,000
a. Dependent Variable: Integritas_laporan_keuangan						

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka model persamaan regresi berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dibuat suatu model persamaan regresi sebagai berikut:

$$AD = a + \beta_1 KMI + \beta_2 KMA + \beta_3 KUA + \mu$$

$$AD = -0,175 + 0,147 KMI + 0,084 KMA + 0,044 KUA + \mu$$

Dari persamaan regresi yang telah disusun dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

α = nilai konstanta sebesar -0,175, artinya jika rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap bernilai nol, maka integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 mengalami penurunan sebesar -0,175.

β_1 = artinya jika rasio komisaris independen (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 akan meningkat sebesar 0,147.

β_2 = artinya jika rasio komite audit (X_2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 akan meningkat sebesar 0,084.

β_3 = artinya jika ukuran kap (X_3) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 akan meningkat sebesar 0,044.

4.1.5.3 Koefisien Korelasi dan Determinasi (R^2)

Menurut Kusumawati dkk. (2017:105), analisis koefisien korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Sedangkan Ghozali (2017:55) koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai (R^2) mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilai (R^2) semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut hasil analisisnya:

Tabel 4.12 Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,573 ^a	,329	,302	,040982	1,782
a. Predictors: (Constant), Rasio_Komisaris_independen, Rasio_Komite_audit, Ukuran_KAP					
b. Dependent Variable: Integritas_laporan_keuangan					

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan hasil koefisien korelasi dan determinasi pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi atau $R = 0,573$ atau sebesar 57% yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap. Sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 dari hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,329 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu rasio komisaris independen, rasio komite audit, ukuran KAP dalam penelitian ini adalah sebesar 32,9%, sedangkan sisanya sebesar 67,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.1.5.4 Pengujian Hipotesis (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2017:56) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan secara simultan. Pengambilan keputusan kriteria pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas tingkat sig $t \leq 0,05$ ($\alpha = 5\%$) atau $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima artinya secara simultan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
- b. Jika probabilitas tingkat sig $t > 0,05$ ($\alpha = 5\%$) atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak artinya secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,063	3	0,021	12,413	,000 ^b
	Residual	0,128	76	0,002		
	Total	0,190	79			
a. Dependent Variable: Integritas_laporan_keuangan						
b. Predictors: (Constant), Rasio_Komisaris_independen, Rasio_Komite_audit, Ukuran_KAP						

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan output hasil uji F yang terdapat pada tabel diatas, didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari

nilai signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) yaitu $0,000 < 0,05$. Selanjutnya membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , dimana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari data diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12,413 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,72.

Sehingga berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini yang berupa rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap secara simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

4.1.5.5 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2017:57) uji signifikan parameter individual (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pengambilan keputusan kriteria pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas tingkat sig $t \leq 0,05$ ($\alpha = 5\%$) atau $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima artinya secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
- b. Jika probabilitas tingkat sig $t > 0,05$ ($\alpha = 5\%$) atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak artinya secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

Untuk membuat kesimpulan menerima atau menolak H_0 , terlebih dahulu harus ditentukan nilai t-tabel yang akan digunakan. Nilai ini bergantung pada besarnya derajat bebas (db) atau *degree of freedom* (df) dan tingkat signifikansi

yang digunakan. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5% dan nilai db/df sebesar : $n-k-1 = 80-3-1 = 76$ diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,99167.

a. Pengujian Pengaruh Rasio Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Berikut ini disajikan hasil tabel uji t menggunakan analisis linier berganda yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Uji t variabel Rasio Komisaris Independen

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,175	,032		-5,468	.000
	Rasio Komisaris Independen	,147	,041	,359	3,580	,001

a. Dependent Variable: Integritas_laporan_keuangan

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan tabel 4.14, terlihat bahwa variabel rasio komisaris independen dari uji t pada model regresi tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi variabel rasio komisaris independen sebesar $0,001 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,580 dengan tanda positif, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,99167.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,580 > 1,99167$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel rasio komisaris independen secara parsial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

b. Pengujian Pengaruh Rasio Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Berikut ini disajikan hasil tabel uji t menggunakan analisis linier berganda yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.15 Hasil Uji t variabel Rasio Komite Audit

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,175	,032		-5,468	.000
	Rasio Komite Audit	,084	,036	,241	2,352	,021

a. Dependent Variable: Integritas_laporan_keuangan

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan tabel 4.15, terlihat bahwa variabel rasio komite audit dari uji t pada model regresi tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi variabel rasio komite audit sebesar $0,021 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,352 dengan tanda positif, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,99167.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,352 > 1,99167$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel rasio komite audit secara parsial berpengaruh positif

terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

c. Pengujian Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Berikut ini disajikan hasil tabel uji t menggunakan analisis linier berganda yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.16 Hasil Uji t variabel Ukuran KAP

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,175	,032		-5,468	.000
	Ukuran KAP	,044	,010	,439	4,442	,000

a. Dependent Variable: Integritas_laporan_keuangan

Sumber : Hasil olahan data, 2019

Berdasarkan tabel 4.16, terlihat bahwa variabel ukuran kap dari uji t pada model regresi tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi variabel ukuran kap sebesar $0,000 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,442 dengan tanda positif, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,99167.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,442 > 1,99167$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran kap secara parsial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Gambaran Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, Ukuran KAP, dan Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

4.2.1.1 Perkembangan Rasio Komisaris Independen pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Perkembangan rasio komisaris independen yang diukur dengan proporsi rasio komisaris independen menunjukkan nilai maksimum untuk tahun 2014 adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar 71%, sedangkan untuk tahun 2015 dan 2016 adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar 62%. Di tahun 2017 adalah PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) sebesar 60%, sedangkan untuk tahun 2018 adalah PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar 62%. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jumlah anggota komisaris independen lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan BUMN lainnya.

Proporsi rasio komisaris independen minimum dari tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar 28%. Sedangkan untuk tahun 2017 adalah PT. Semen Baturjaya Tbk. (SMBR) dan PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF) sebesar 20%. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak mengimplementasikan peraturan OJK No.33/PJOK.04/2014 tentang komisaris independen, yang dimana setiap perusahaan terbuka atau *go public* wajib untuk

mempunyai proporsi komisaris independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Secara keseluruhan nilai rata-rata rasio komisaris independen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setiap tahunnya berfluktuasi. Berdasarkan hasil analisis data perkembangan rasio komisaris independen yang diukur berdasarkan proporsi komisaris independen diketahui bahwa dari 80 data observasi, 71 diantaranya atau 88% telah melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan OJK No.33/PJOK.04/2014. Sedangkan 12%nya, yaitu PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR), PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF), dan PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR) tidak mengimplemtasikan peraturan OJK tersebut, hal ini dikarenakan pihak perusahaan memberhentikan dan mengganti komposisi komisaris independen yang disebabkan pihak yang bersangkutan menjabat jabatan rangkap di perusahaan serta dengan berakhirnya masa jabatan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan hal tersebut perkembangan rasio komisaris independen termasuk kedalam kategori yang baik.

4.2.1.2 Perkembangan Rasio Komite Audit pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Perkembangan rasio komite audit yang diukur dengan proporsi anggota komite dari luar perusahaan menunjukkan nilai maksimum untuk tahun 2014 sampai dengan 2015 dimiliki oleh PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebesar 80%. Di tahun 2016 oleh PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar 75%. Sedangkan

untuk tahun 2017 dan 2018 oleh PT. Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar 80% di tahun 2017 dan PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) sebesar 75%. Dilihat dari perusahaan-perusahaan tersebut yang memiliki jumlah anggota komite audit eksternal yang bersifat independen sebanyak 2 (dua) orang hal ini telah sesuai dengan batas minimal jumlah anggota komite audit eksternal yang independen berdasarkan peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015 menyebutkan bahwa setiap perusahaan *go public* sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) orang komite audit, yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota komite dari luar perusahaan dan 1 (satu) orang dari anggota komisaris independen.

Proporsi rasio komite audit minimum di tahun 2014 PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) sebesar 33%, di tahun 2015 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar 25%, tahun 2016 adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar 33%, tahun 2017 adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 20%, sedangkan tahun 2018 adalah PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) sebesar 33%. Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) pada tahun 2015 dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) pada tahun 2017 tidak sesuai dengan peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015 dikarenakan perusahaan tersebut memiliki jumlah anggota komite dari luar perusahaan hanya 1 (satu) orang kurang dari 2 (orang) sesuai dengan peraturan tersebut. Sedangkan untuk PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) 2014, 2018 serta PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) di tahun 2016 memiliki jumlah anggota komite audit dari komisaris independen yang lebih besar dibandingkan dengan anggota komite dari luar perusahaan, hal ini yang menyebabkan proporsi komite auditnya minimum.

Secara keseluruhan nilai rata-rata proporsi rasio komite audit berfluktuatif. Berdasarkan analisis data perkembangan rasio komite audit yang diukur dengan proporsi komite audit diketahui bahwa dari 80 data observasi, 76 diantaranya atau 95% telah melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015. Sedangkan 5% nya, yaitu PT. Adhi Karya Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, dikarenakan dari perusahaan tersebut anggota komite audit dari luar perusahaan atau pihak independen diberhentikan oleh pihak perusahaan, serta anggota komite audit ada yang diangkat menjadi dewan komisaris sehingga total jumlah komite audit komposisinya tidak sesuai dengan peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015.

Berdasarkan hal tersebut perkembangan rasio komite audit termasuk kedalam kategori yang baik.

4.2.1.3 Perkembangan Ukuran KAP pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Perkembangan Ukuran KAP yang diukur menggunakan jasa audit *The Big Four* selama 5 (lima) tahun berturut-turut mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Dari beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya menggunakan jasa audit *Non The Big Four* menjadi menggunakan jasa audit *The Big Four* terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengalami hal tersebut yaitu PT. Jasa Marga Tbk. (JSMR) pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dan PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT) pada tahun 2017.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut ukuran kap yang diukur berdasarkan jasa audit yang dilakukan oleh *The Big Four* dari 16 perusahaan, 13 perusahaan yang menggunakan jasa audit *The Big Four* selama 5 (lima) tahun berturut-turut yang berarti bahwa KAP besar mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengaudit sehingga menghasilkan audit yang lebih akurat, karena memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien. Jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat maka KAP tersebut akan hilang. Selain itu KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP kecil, dengan demikian mereka terancam oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila mereka tidak menghasilkan laporan audit yang tidak akurat. 3 perusahaan yang tidak menggunakan jasa audit *The Big Four* adalah perusahaan PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT. Semen Baturaja Tbk. (SMBR), PT. PP properti Tbk. (PPRO).

Berdasarkan hal tersebut perkembangan ukuran kap termasuk kedalam kategori yang baik.

4.2.1.4 Perkembangan Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Perkembangan integritas laporan keuangan yang diukur dengan prinsip konservatisme menunjukkan nilai maksimum untuk tahun 2014 adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebesar 0,069, pada tahun 2015 adalah PT. Semen Baturaja Tbk. (SMBR) sebesar 0,033, tahun 2016 adalah PT. Bank Mandiri Tbk. (BMRI) sebesar 0,021, sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 adalah PT. Bank

Negara Indonesia Tbk. (BBNI) pada tahun 2017 sebesar 0,022 dan untuk tahun 2018 adalah PT. Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) sebesar 0,056.

Perusahaan BUMN yang memiliki nilai integritas laporan keuangan yang rendah pada tahun 2014 adalah PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) sebesar -0,167, untuk di tahun 2015 adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar -0,101, pada tahun 2016 adalah PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT) sebesar -0,181, sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 adalah PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI) sebesar -0,178 pada tahun 2017 dan untuk tahun 2018 adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) sebesar -0,071.

Dari 16 perusahaan BUMN tersebut tidak ada perusahaan yang konsisten dalam menyajikan laporan keuangan yang memiliki nilai integritas dari penyajian laporan tersebut selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Sedangkan Perusahaan BUMN yang konsisten tidak menerapkan prinsip konservatisme sehingga tidak menyajikan laporan keuangan yang mempunyai nilai integritas laporan keuangan yang tinggi adalah PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR), PT. Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM), PT. Kimia Farma Tbk. (KAEF), PT. Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT. PP Properti Tbk. (PPRO).

Perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme tersebut merupakan perusahaan yang memiliki nilai relevan dan andal dari laporan keuangannya, serta memiliki nilai integritas yang tinggi dapat dinilai dengan menggunakan prinsip tersebut karena dari prespektif perilaku oportunistik teori akuntansi positif, perusahaan yang mengalami kegagalan manajemen akan menutupi masalah kinerja perusahaan dengan meningkatkan pendapatan serta aktiva bersih, maka untuk

menghindari manipulasi, maka dari itu praktik akuntansi konservatisme sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut perkembangan integritas laporan keuangan termasuk kedalam kategori yang kurang baik.

4.2.2 Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan Secara Simultan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.13 menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel ($12,413 > 2,72$) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Sehingga berdasarkan pengujian hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Nilai koefisien yang menunjukkan angka positif dapat diartikan bahwa rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap akan memberikan kontribusi terhadap integritas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini kondisi rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap mempengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN termasuk kategori baik disebabkan oleh komponen pendukung seperti proporsi komisaris independen, proporsi komite audit dari luar perusahaan, jasa

audit *The Big Four* sehingga ketiganya secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap meningkatnya integritas laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4.2.3 Pengaruh Rasio Komisaris Independen, Rasio Komite Audit, dan Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan Secara Parsial pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

4.2.3.1 Pengaruh Rasio Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel rasio komisaris independen memiliki nilai t hitung sebesar $3,580 > 1,99167$ (t tabel), dengan nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), artinya bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi sampel penelitian masih ada perusahaan yang belum sesuai dengan peraturan OJK No. 33/PJOK.04/2014 dikarenakan adanya rangkap jabatan sehingga pihak perusahaan memberhentikan dan adanya pengunduran diri, sehingga proporsi rasio komisaris independennya kurang dari 30% berdasarkan peraturan OJK tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwaningty dkk. (2018), Nurdiniah dan Pradika (2017), Dewi dan Putra

(2016), Mais dan Nuari (2016), Gayatri dan Suputra (2013) yang menyatakan bahwa rasio komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya proporsi komisaris independen akan meningkatkan ke integritasan laporan keuangan yang disajikan. Dalam hal ini komisaris independen memiliki independensi dan integritas yang kuat sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh prestasi manajemen maka pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan memiliki rasio komisaris independen yang banyak dapat diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen memiliki integritas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menyesatkan pengguna dalam proses pengambilan keputusan.

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar manajemen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan, salah satunya meningkatkan keandalan suatu laporan keuangan. Dengan semakin tingginya proporsi rasio komisaris independen maka akan terciptanya laporan keuangan yang memiliki integritas yang tinggi. Hubungan ini dapat dipahami karena dengan semakin banyaknya proporsi rasio komisaris independen maka pengendalian internal perusahaan terutama terhadap pihak manajemen dan para *stakeholders* akan menjadi semakin baik terutama mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen untuk pengambilan keputusan.

4.2.3.2 Pengaruh Rasio Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel rasio komite audit memiliki nilai t hitung sebesar 2,352 > 1,99167 (t tabel), dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 kurang dari 0,05 (0,021 < 0,05), artinya bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi sampel penelitian masih ada beberapa perusahaan BUMN yang belum sesuai dengan peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015 disebabkan karena adanya pemberhentian anggota komite audit oleh perusahaan, mengundurkan diri menjadi komite audit, dan pihak perusahaan mengangkat menjadi dewan komisaris.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Badewin (2019), Pradika dan Hoesada (2018), Sofia (2018), Saverio (2017), Wirama dkk. (2016), Gayatri dan Suputra (2013), Putra dan Muid (2012) yang menyatakan bahwa rasio komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit diharapkan bisa mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang bersangkutan, termasuk di dalamnya adalah integritas laporan keuangan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh para *stakeholders* untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang

diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan.

Di dalam pelaksanaannya melakukan komunikasi formal antara direktur, manajemen, auditor eksternal dan audit internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, audit internal, dan audit eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dapat berjalan baik, maka akan meningkatkan akurasi laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

Dengan demikian keberadaan komite audit dari struktur perusahaan diharapkan dapat mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan serta sebagai penengah apabila terjadi selisih pendapat antara *stakeholders* dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mencapai keseimbangan akhir, sehingga laporan lebih akurat. Jadi semakin banyak proporsi rasio komite audit di dalam perusahaan maka laporan keuangan yang disajikan akan menghasilkan laporan yang memiliki nilai integritas laporan keuangan yang tinggi.

4.2.3.3 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel ukuran kap memiliki nilai t hitung sebesar $4,442 > 1,99167$ (t tabel), dengan nilai signifikansi sebesar $0,000$ kurang dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$), artinya bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran kap berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari 5 (lima) tahun berturut-turut terdapat sebagian perusahaan BUMN yang menggunakan jasa audit *The Big*

Four dalam pemrosesan pengauditan. Perusahaan tersebut adalah PT. Adhi Karya Tbk. (ADHI), PT. Semen Baturjaja Tbk. (SMBR), dan PT. PP Properti Tbk. (PPRO).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Saksakotama dan Cahyonowati (2014), Widaryanti dan Sukanto (2018) yang menyatakan bahwa ukuran kap berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) besar dalam hal ini *The Big Four* memiliki inisiatif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP skala *Non The Big Four*, sehingga akan terciptanya integritas laporan keuangan. Dikarenakan KAP *The Big Four* lebih tinggi dibandingkan dengan KAP *Non The Big Four*.

Maka adanya pengaruh yang signifikan dari kualitas audit yang dilakukan oleh jasa audit KAP *The Big Four* lebih berkualitas dalam menghasilkan laporan audit, karena dibekali dengan serangkaian pelatihan dan prosedur yang memadai, serta memiliki program audit yang dianggap lebih baik dari pada auditor dari KAP *Non The Big Four*. Oleh karena itu, KAP *The Big Four* dipercaya dalam melaksanakan tugasnya dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga tingkat integritas laporan keuangan menjadi tinggi. Hasil ini mendukung teori reputasi yang memprediksi adanya hubungan positif antara kualitas audit dengan integritas laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh rasio komisar independen, rasio komite audit, dan ukuran kap terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik tahun 2014-2018. Dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 dari ke 16 perusahaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut memiliki rasio komisaris independen yang termasuk kategori baik, dimana hampir secara keseluruhan perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK.
2. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018 dari ke 16 perusahaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut memiliki rasio komite audit yang termasuk kategori baik, dimana hampir secara keseluruhan perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK.
3. Ukuran KAP termasuk kedalam kategori baik, dimana hampir secara keseluruhan dari 16 perusahaan BUMN menggunakan jasa KAP *The Big Four*, karena KAP *The Big Four* memiliki insentif yang lebih besar, Apabila KAP tersebut tidak mengauditnya dengan baik, maka KAP tersebut akan hilang dimata kliennya.

4. Perkembangan Integritas laporan keuangan termasuk kedalam kategori kurang baik, dimana hampir secara keseluruhan dari 16 perusahaan BUMN memiliki nilai integritas laporan keuangan yang rendah. Disebabkan perusahaan tersebut tidak menyajikan laporan keuangan yang andal dan jujur, serta tidak menerapkan prinsip konservatisme dalam menyajikan laporan keuangannya. Sehingga memiliki nilai integritas yang rendah dan pihak manajemen berpotensi melakukan tindakan kecurangan pelaporan laporan keuangan.
5. Dari hasil pengujian Uji F menunjukkan bahwa rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap secara simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap dalam penelitian ini mampu menjelaskan terjadinya ke integritasan laporan keuangan. Rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap dalam penelitian ini hanya mampu mempengaruhi integritas laporan keuangan sebesar 32,9% dan selebihnya dipengaruhi faktor lain.
6. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut :
 - a. Rasio komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, artinya semakin banyak tingkat proporsi rasio komisaris independen, maka laporan keuangan yang dibuat memiliki nilai integritas laporan keuangan yang tinggi begitupun sebaliknya.
 - b. Rasio komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, artinya semakin banyak proporsi rasio komite audit, maka pengawasan terhadap audit internal dan eksternal berjalan dengan

baik. Sehingga laporan keuangan yang dibuat memiliki nilai integritas laporan keuangan yang tinggi.

- c. Ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, artinya semakin baik KAP tersebut melaksanakan *auditeenya* maka akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki nilai integritas yang tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh rasio komisaris independen, rasio komite audit, dan ukuran kap terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Adapun saran yang diberikan adalah :

1. Bagi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi perusahaan PT. Semen Indonesia Tbk, PT. Semen Baturjaya Tbk yang belum memenuhi aturan seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan OJK No.33/PJOK.04/2014 terkait rasio komisaris independen alangkah baiknya harus memenuhi ketentuan mengenai proporsi komisaris independen minimal 30%, agar pengawasan terhadap pihak manajemen dalam pembuatan laporan keuangan berjalan efektif dan efisien.
2. Bagi Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi PT. Adhi Karya Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang belum memenuhi aturan juga, seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan OJK

No.55/PJOK.04/2015 terkait jumlah anggota komite audit eksternal. Alangkah lebih baiknya agar memenuhi standar minimal yang ditetapkan, sehingga mampu membuat pengawasan untuk meminimalisir kecurangan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Serta melakukan monitoring proses pelaporan laporan keuangan, yang dilakukan oleh para *stakeholders*. Agar mampu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antara audit internal dan para *stakeholders*.

3. Bagi Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi PT. Adhi Karya Tbk, PT. Semen Baturjaja Tbk, PT. PP Properti Tbk, disarankan agar berkerjasama dengan Kantor Akuntan Publik *The Big Four*, karena KAP tersebut memiliki reputasi yang baik, serta mempunyai insentif yang lebih besar. Hal tersebut digunakan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya, dibandingkan dengan KAP skala *Non The Big Four*.
4. Bagi Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi PT. Adhi Karya Tbk, PT. Semen Indonesia Tbk, PT. Waskita Karya Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. Kimia Farma Tbk, PT. Wijaya Karya Tbk, PT. PP Properti Tbk agar menyajikan laporan keuangan yang memiliki nilai integritas laporan keuangan yang tinggi sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan tersebut.
5. Peneliti ini hanya menggunakan 16 sampel penelitian, oleh sebab itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya menambahkan jumlah sampel atau dengan mengambil objek selain perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Agar perusahaan di Indonesia yang telah *go Public* atau telah

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih memperhatikan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan ke publik, harus sesuai dengan kenyataannya. Bukan semata-mata untuk menarik para investor, tetapi harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan dimasa depan.

6. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lainnya yang mempengaruhi integritas laporan keuangan misalnya *leverage*, Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). Peneliti selanjutnya juga dapat mempertahankan variabel independen yang dilakukan oleh peneliti, serta dapat menggunakan objek penelitian selain perusahaan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bagi pihak manajemen perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Dengan demikian dapat meminimalisir kecurangan dalam hal laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A.S., Bilings, B.K. Morton, R.M. dan Harris, M.S. (2002), The Role of Accounting Conservatism in Mitigating Bondholder-Shareholder Conflicts over Dividend Policy and in Reducing Debt Costs, *The Accounting Review*, Vol.77 No.4, hlm. 867-890.
- A'yunin, Q., Ulupui, I., dan Nindito, M. (2019), The Effect of the Size of Public Accounting Firm, Leverage, and Corporate Governance on the Integrity of Financial Statement: A Study on Companies Listed on Indonesian Stock Exchange. *International Conference on Economics, Education, Business and Accounting*, KnE Social Sciences, pages 820–840.
- al., V. e. (2016), *Integrity in the Bussiness Panorama Models Of European Best-Practices*. Switzerland: SpringerBriefs in Business.
- Badewin. (2019), Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.8 No.1, 1 Januari-Juni 2019,E-ISSN : 2598-7372 ,ISSN : 2089-6255 .
- Dewi, N. d., & Putra, I. (2016), Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Pada Integritas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15.3.hlm. 2272-2273.
- Education, B. P. (2017), *ACCA Approved -P7 Advanced Audit and Assurance (INT) (Septmber 2017 to june 2018 exams)*. Becker Professional Education Ltd.
- Flaherty H., D. (2014), *Protecting Privacy in Surveillance Societies*. London: UNC Press Books.
- Gayatri, I., & Suputra, I. (2013), Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , ISSN: 2302-8556 hlm.345-360.
- Ghozali. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariete*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardy, K. (2015), *Entripise Risk Management*. United States of America: John Wiley & Sons, Inc. All Rights Reserved.
- arventy, G., Kholmi, M., & Qoyyimah, S. (2015), Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (Kap) Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* , ISSN: 2088-0685 Vol.5 No. 2,Pp 781-790.

- Hay, D., Knechel, W., dan Willekens, M. (2014), *The Routledge Companion to Auditing*. New York: Routledge.
- Hery. (2017), *Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis*, Jakarta: Grasindo.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190531144248-92-400048/menyoal-laba-bumn-yang-mendadak-kinclong> diakses pada 23 Oktober 2019.
- <https://www.economy.okezone.com//read/2016/01/27/278/1298264/direksi-timah-dituding-manipulasi-laporan-keuangan> diakses pada 23 Oktober 2019.
- <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4603814/kisruh-laporan-keuangan-garuda-ditolak-komisaris-hingga-terbukti-cacat> diakses pada 23 Oktober 2019.
- Juliandi., Azuar., Irfan. dan Manurung, S. (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*, Medan: UMSU PRESS.
- Kieso, et al. (2007), *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumawati, N., Retta, A., dan Sari, N. (2017), *Pengantar Statistika Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mais Gusliana, R. d., dan Nuari, F. (2016), Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* , ISSN: 2088-0685 Vol. 6 No. 2 Pp 907-912.
- Moh Nazir. (2014), *Metodologi Penelitian*, Cetakan 6, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdiniah, D., dan Pradika, E. (2017), Effect of Good Corporate Governance, KAP Reputation, Its Size and Leverage on Integrity of Financial Statements. *International Journal of Economics and Financial Issues* , ISSN: 2146-4138 hlm.7(4), 174-181.
- Nurjannah, L., dan Pratomo, D. (2014), Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *e-Proceeding of Management* , ISSN : 2355-9357.Vol.1, No.3.hlm. 99.
- Peraturan BAPEPAM No.IX.I.5 Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /Pojk.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015) tentang penyajian laporan keuangan.
- Prianduri, A., Pratiwi, R., dan Purwaningtyas, O. (2018), Analysis of Corporate Governance, Leverage and Company Size on the Integrity of Financial Statements . *Indonesian Management and Accounting Research* , olume 17 Number 01 ISSN: (e) 2441-9724 (p) 1411-8858.
- Puspita, M. d., dan Utama, I. (2016), Fee Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , Vol.16.3. September (2016): 1829-1856 .
- Ramadhani, H., Paminto, A., dan Istiantoro, I. (2017), Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI . *AKUNTABEL* , Volume 14, No. 2.hlm. 2528-1135157 .
- Rossi, C. (2014), *A Risk Professional's Survival Guide*. Canada: John Wiley & Soons, inc Hoboken, New Jersey.
- Savitri, E. (2016), *Konservatisme Akuntansi: Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Yogyakarta: Pustaka Sahila Yogyakarta.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. (2017), *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso, S. (2018), *Etika dalam Bisnis dan Profersi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofia, I. (2018), Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol.11 No.2, Hlm 192 – 207.
- Solikhah, N. d. (2017), Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No.2 p-ISSN: 2088-768X e-ISSN: 2540-9646 hlm. 171-173.
- Sugiyono. (2017), *Metode Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Widaryanti, & Sukanto, E. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran Kap Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). *Jurnal Bingkai Ekonomi*, Vol.3, No.1, pp:31 - 42 .
- Winwin, Y., dan Abdulloh, M. (2017), *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Wirama, D., Putri, I., dan Amrulloh. (2016), Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Kap, Audittenure Dan Audit Report Lag Pada Integritas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Issn : 2337-3067 Vol.5.8 Hlm.2305-2328.
- Wu, H., dan Patel, C. (2014), *Adoption Of Anglo American Models Of Corporate Governance And Financia*. UK: Emerald Group.
- Zhems, K., Gramling, A., dan Rittenberg, L. (2015), *Auditng: A Risk Based-Approach to Conducing a Quality Audit*. USA: Cengage Learning.